



PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

Laporan Riset
2020



*Mimpi
Kesejahteraan
di Masa
Lanjut Usia*

LAPORAN RISET
Mimpi Kesejahteraan di Masa Lanjut Usia



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

2020

Mimpi Kesejahteraan di Masa Lanjut Usia

ISBN: 978-623-95082-4-1

Tim Penulis:

Eka Afrina Djamhari, Aqilatul Layyinah, Adrian Chrisnahutama, Darmawan Prasetya, HERNI Ramdlaningrum

Tim Peneliti:

Phadli Hasyim Harahap, Tuti Eka Asmarani, Rob Franzone

Editor:

Ah Maftuchan

Layout dan Desain:

Dedi Sunarya

Foto Sampul:

Devi Puspita Amaritha Yahya

Penerbit:

Perkumpulan PRAKARSA
Rawa Bambu 1 Blok A No. 8E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
Indonesia

Keywords:

Kesejahteraan, Lansia, Usia Produktif, Perspsi dan Harapan.

Disclaimer:

Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian “Mimpi Kesejahteraan di Masa Lanjut Usia” yang didukung oleh Hivos-Voice. Penelitian dilakukan di empat provinsi, yakni Sulawesi Barat, Banten, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan bagian dari program *Welfare Improvement on Social Assistance for Elderly in Indonesia* (WISE Indonesia). Isi laporan penelitian sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun dan tidak mencerminkan pandangan Hivos-Voice.



Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Daftar Grafik	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Singkatan	viii
Ringkasan Eksekutif	x
Kata Pengantar	xiii

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang	2
1.2 Pertanyaan Penelitian	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metodologi Penelitian	5
1.6 Batasan Penelitian	7

Bab 2

Literatur Studi Transisi Struktur Kerja dan Jaminan Ketenagakerjaan

2.1 Tren Pekerjaan di Era Revolusi Industri 4.0 dan Revolusi Industri 4.0	10
2.2 Tantangan dan Persiapan Menuju Lansia	11
2.3 Payung Hukum Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun	15
2.4 Pembelajaran dan Pengalaman Skema Jaminan Pensiun dari Negara Lain	17

Bab 3

Hasil Temuan: Kondisi, Persepsi, dan Harapan Usia Produktif

3.1 Kondisi Kelompok Usia Produktif	22
3.2 Persepsi Kelompok Usia Produktif terhadap Kehidupan Lansia	28

3.3 Harapan Kelompok Usia Produktif di Masa Lansia	41
--	----

3.4 Analisis Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun	45
---	----

Bab 4

Penutup

4.1 Kesimpulan	52
----------------	----

4.2 Rekomendasi	56
-----------------	----

Daftar Pustaka	59
----------------	----

Daftar Grafik

Grafik 1	Status tinggal responden	23
Grafik 2	Status kepemilikan rumah	24
Grafik 3	Persentase aktivitas responden	24
Grafik 4	Persentase aktivitas responden berdasarkan jenis kelamin	24
Grafik 5	Persentase jenis pekerjaan responden menurut jenis kelamin	25
Grafik 6	Distribusi pendapatan responden bekerja	25
Grafik 7	Pentingnya asuransi hari tua atau pensiun	26
Grafik 8	Kepemilikan persiapan hari tua atau masa lansia	26
Grafik 9	Pengetahuan mengenai kecukupan atas jaminan hari tua/pensiun yang dimiliki	27
Grafik 10	Jumlah nominal yang disisihkan untuk hari tua	27
Grafik 11	Persepsi terhadap kehidupan lansia secara umum di Indonesia	29
Grafik 12	Kehidupan lansia secara umum di Indonesia	29
Grafik 13	Mempunyai teman lansia	30
Grafik 14	Kegiatan khusus lansia di tempat tinggal responden menurut jenis wilayah dan provinsi	30
Grafik 15	Keterlibatan usia produktif dalam kegiatan khusus lansia	31
Grafik 16	Pengetahuan responden mengenai program perlindungan sosial lansia	31
Grafik 17	Pengetahuan responden mengenai program perlindungan sosial lansia menurut provinsi	32
Grafik 18	Pengetahuan responden mengenai program perlindungan sosial lansia menurut jenis kelamin	32
Grafik 19	Program perlindungan sosial lansia yang diketahui	33
Grafik 20	Persepsi mengenai pelayanan kesehatan yang mengakomodir kebutuhan lansia menurut provinsi	33
Grafik 21	Pengetahuan masyarakat bahwa pikun merupakan bagian normal dari penuaan	34
Grafik 22	Pengetahuan responden mengenai demensia dan alzheimer	34



Grafik 23	Pengetahuan responden pada gejala demensia dan alzheimer	35
Grafik 24	Usia produktif merasa bertanggung jawab untuk merawat dan memenuhi kesejahteraan lansia	37
Grafik 25	Persepsi tinggal di panti werdha	38
Grafik 26	Bentuk kekerasan terhadap lansia	40
Grafik 27	Cara menanggulangi kekerasan terhadap lansia	40
Grafik 28	Harapan tempat tinggal responden saat lansia	41
Grafik 29	Harapan tinggal bersama saat lansia	41
Grafik 30	Harapan mengasuh cucu saat lansia	42
Grafik 31	Persepsi mengenai batasan usia yang dapat bermanfaat bagi masyarakat	43
Grafik 32	Pekerjaan yang Ingin dilakukan responden saat lansia	44
Grafik 33	Kondisi bahagia ketika lansia	44
Grafik 34	Persentase kemiskinan menurut usia	49

Daftar Tabel

Tabel 1	Lokasi dan jumlah responden survei	6
Tabel 2	Jenis dan karakteristik sistem pensiun	13
Tabel 3	Perbedaan antara jaminan hari tua dan jaminan pensiun	45
Tabel 4	Skema perubahan batas upah tertinggi dan nilai manfaat pensiun yang dapat dinikmati peserta BPJS Ketenagakerjaan	47

Daftar Singkatan

ASABRI	Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ASLUT	Asistensi Sosia Lanjut Usia Terlantar
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPJS Ketenagakerjaan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	Badan Pusat Statistik
BPU	Bukan Penerima Upah
BUP	Batas Usia Pensiun
DKI	Daerah Khusus Ibukota
FF	Fully funded
IFF	Illicit Financial Flow
JHT	Jaminan Hari Tua
JKK	Jaminan Kecelakaan Kerja
JKM	Jaminan Kematian
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
JP	Jaminan Pensiun
Lansia	Lanjut Usia
NCDs	Non-communicable disease
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
PAYG	Pay as you go
PBI	Penerima Bantuan Iuran
PKH	Program Keluarga Harapan
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PP	Peraturan Pemerintah
PPh	Pajak Penghasilan
PT	Perseroan Terbatas

PU	Penerima Upah
SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional
Sosio	Sosiologi
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
TASPEN	Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
UNFPA	United Nation Population Fund
UU	Undang-Undang
WHO	World Health Organization

Ringkasan Eksekutif

Populasi penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh kelompok usia produktif. Berdasarkan proyeksi penduduk (Bappenas, 2017), Bappenas menyatakan pada periode 2030 - 2040 Indonesia akan menikmati bonus demografi. Proporsi penduduk usia produktif akan mencapai lebih dari 60 persen, jumlah ini lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Namun, bonus demografi tidak secara otomatis dapat dinikmati oleh Indonesia, melainkan perlu upaya agar ketersediaannya bermanfaat dan dapat dipanen di tahun-tahun mendatang. Kelompok usia produktif saat ini hidup dalam era revolusi industri 4.0 ketika peluang dan tantangan baru bermunculan. Sebagian besar pekerjaan di era revolusi industri 4.0 menuntut adanya tenaga kerja terampil. Jika kelompok usia produktif tidak memiliki keterampilan yang memadai, akan tereksklusi dari pasar kerja. Akibatnya, pengangguran menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap pergeseran struktur pasar dari formal menjadi informal.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Februari tahun 2020, mencatat jumlah pekerja informal saat ini mencapai 74 juta orang (57 persen) dari total angkatan kerja yang bekerja. Angkatan kerja didominasi oleh pendidikan rendah, tingkat sekolah dasar sebesar 53 persen, sekolah tingkat menengah sebesar 31 persen, dan pendidikan tinggi sebesar 13 persen. Di samping itu, masih terdapat sekitar 2 persen angkatan kerja yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah (BPS, 2020). Jika kondisi ini tidak segera ditanggulangi, kesempatan Indonesia dalam periode emas bonus demografi yang diprediksi hanya belangsung selama 10 tahun dan akan berlalu begitu saja. Kondisi ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menghadapi ledakan penduduk lansia yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2050.

Melihat struktur pasar kerja yang berkembang serta jumlah populasi kelompok usia produktif yang akan mencapai puncaknya di sepuluh tahun mendatang, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat kondisi kelompok usia produktif dan membaca ekspektasi kelompok usia produktif di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method* antara kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendekatan kuantitatif, data primer didapatkan melalui survei dengan bentuk pertanyaan tertutup. Data primer dikumpulkan melalui survei kepada sebanyak 1400 responden kelompok usia produktif, namun setelah dilakukan *cleaning* hanya 1.396 data dari hasil survei yang dapat digunakan untuk dianalisis lebih lanjut. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam menggunakan metode wawancara mengenai kebijakan yang telah ada, baik di tingkat nasional maupun daerah, kepada informan yang dipilih secara *purposive*.



Hasil penelitian menunjukkan kondisi kelompok usia produktif saat ini: (1) Kelompok usia produktif mayoritas merupakan *sandwich generation*, hampir 70% tinggal dalam tiga generasi. Sebagian besar rumah yang ditinggali saat ini bukan milik sendiri; (2) Hampir 50% responden tidak bekerja dan mayoritas adalah perempuan. Dari responden yang bekerja, paling banyak berpendapatan kurang dari Rp2.500.000,00 per bulan baik formal dan informal; (3) Hanya 11% responden yang memiliki persiapan hari tua atau masa lansia. Sebanyak 5% mendapatkan JHT atau JP dari tempatnya bekerja di sektor formal dan sebanyak 6% pekerja di sektor informal mempersiapkan secara mandiri dalam bentuk tabungan; dan (4) Responden yang tidak memiliki persiapan hari tua atau masa lansia menyatakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada saat lansia mereka akan bergantung pada keluarga atau anak dan pemerintah; (5) Besaran nilai manfaat JP juga belum dapat memenuhi kebutuhan hidup layak saat lansia, mengingat mayoritas pekerja berupah rendah dan program JP belum mengakomodir pekerja dari sektor informal atau yang bekerja sendiri tanpa dibantu orang lain. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan pengelola program dari BPJS Ketenagakerjaan diketahui bahwa JP yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berpotensi defisit di masa mendatang.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi kelompok usia produktif terhadap lansia antara lain: (1) Kelompok usia produktif secara umum melihat bahwa kondisi kehidupan lansia di Indonesia sudah baik. Lansia di perkotaan dinilai memiliki kehidupan yang lebih baik daripada di perdesaan; (2) Lebih dari 80% responden berinteraksi dengan kelompok lansia. Namun, hanya 38% yang mengaku berteman dengan kelompok lansia; (3) Sebanyak 42 persen usia produktif tidak pernah mendengar terkait program perlindungan sosial untuk lansia; (4) Terdapat ketimpangan kualitas layanan kesehatan antarprovinsi yang menjadi area survei. Responden menilai lansia masih belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai; (5) Kelompok usia produktif menyatakan pikun merupakan bagian normal dari proses penuaan dan hanya 10% responden yang pernah mendengar demensia dan alzheimer; (6) Mayoritas kelompok usia produktif merasa memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk merawat lansia. Di sisi lain, ketimpangan gender masih terjadi. Anggota keluarga perempuan memiliki peran yang lebih besar dalam melakukan perawatan dibanding anggota keluarga laki-laki; (7) Kelompok usia produktif tidak setuju lansia tinggal di panti werdha. Alasannya karena keluarga dinilai bisa lebih menjamin dan merawat lansia serta lebih sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat; dan (8) Terdapat 5% responden yang pernah melihat secara langsung kekerasan terhadap lansia.

Kelompok usia produktif memiliki harapan di masa lansia, yakni sebagian besar berharap dapat tinggal di rumah sendiri dan tinggal bersama orang terdekat, bisa tetap bekerja saat lansia dengan jenis pekerjaan sebagai wiraswasta/wirausaha, dan berharap pensiun seharusnya tidak dibatasi oleh usia tertentu, melainkan berdasarkan jenis pekerjaan dan kemampuan dalam bekerja. Secara subjektif kelompok usia produktif berharap kelak dapat memiliki rumah sendiri, bisa tinggal bersama keluarga, bisa pergi

berlibur/rekreasi, mengurus cucu, dan lain sebagainya ketika lansia.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan kelompok usia produktif menjadi generasi lansia yang berkualitas, antara lain: (1) Pemerintah perlu segera melakukan perbaikan regulasi, antara lain UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN, PP No. 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun, PP No 60 tahun 2015 tentang perubahan, PP No. 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua, dan UU No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia; (2) Pemerintah perlu melakukan penyesuaian nominal iuran jaminan pensiun secara berkala hingga mencapai nilai maksimum sesuai kebijakan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya defisit dana jaminan sosial, khususnya jaminan pensiun, guna menghadapi perubahan demografi di masa mendatang; (3) Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan perlu mempromosikan dan melakukan sosialisasi terus menerus mengenai pentingnya jaminan pensiun dan kontribusi atas iuran kepada masyarakat luas; (4) Berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan untuk seluruh penduduk Indonesia, khususnya pada anak-anak dan remaja, sebagai upaya persiapan transisi demografi; (5) Pemerintah harus menghilangkan diskriminasi terkait usia, termasuk hambatan usia dalam pekerjaan dan jenis pekerjaan; (5) Pemerintah perlu memastikan panti werdha atau rumah perawatan lansia dibangun dan dijalankan sesuai dengan standardisasinya; (6) Pemerintah diharapkan dapat mempromosikan kesehatan dan pencegahan penyakit sepanjang hayat untuk mempertahankan kapasitas fungsional seseorang, termasuk kesehatan mental; (7) Pemerintah perlu memastikan panti werdha atau rumah perawatan lansia dibangun dan dijalankan sesuai dengan standardisasinya.

Kata Pengantar

Kelompok usia produktif saat ini mendominasi total populasi penduduk di Indonesia dan dalam kurun waktu satu dekade ke depan Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif akan mencapai lebih dari 60 persen dari total populasi penduduk. Sayangnya usia peoduktif yang ada saat ini masih didominasi oleh kelompok dengan pendidikan rendah, tingkat sekolah dasar sebesar 53 persen, sekolah menengah 31 persen, dan pendidikan tinggi hanya 13 persen.

Besarnya proporsi penduduk usia produktif ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pekerja informal. Berdasarkan data Sakernas, terdapat 74 juta orang (57 persen) dari angkatan kerja yang bekerja di sektor informal. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia perlu segera berbenah agar bonus demografi yang diprediksi akan berlangsung selama 10 tahun tidak berlalu begitu saja. Tentu ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi ledakan penduduk usia penduduk lansia pascabonus demografi berlalu.

Pemerintah telah menempatkan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia ini dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya adalah peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda (usia produktif). Perhatian bagi kelompok usia produktif secara eksplisit sudah disampaikan oleh pemerintah dalam RPJMN. PRAKARSA berharap, pemerintah bersungguh-sungguh melaksanakan komitmen peningkatan kualitas kelompok usia produktif ini. Perbaikan ini dapat dilakukan mulai dari memberikan jaminan pendapatan dasar bagi kelompok usia produktif dan juga mensosialisasikan dengan lebih masif terkait dengan persiapan menghadapi masa lansia (persiapan hari tua atau pensiun). Sehingga ketika mereka memasuki masa lansia tidak lagi membebani keluarga dan negara. Peran pemerintah daerah juga sangat penting, karena perluasan informasi mengenai jaminan hari tua atau jaminan pensiun khususnya untuk kelompok pekerja informal masih belum diketahui oleh kelompok usia produktif.

Berdasarkan akan terjadinya bonus demografi dan pergeseran struktur pasar kerja yang terus berkembang karena revolusi industri 4.0, PRAKARSA menilai perlu dilakukan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi kelompok usia produktif saat ini dan membaca ekspektasinya di masa depan. Penelitian ini bagian dari komitmen PRAKARSA dalam penguatan pembangunan sumber daya manusia dan pemenuhan jaminan sosial untuk semua.

Adapun beberapa temuan menarik dari hasil penelitian yang dilakukan PRAKARSA menunjukkan bahwa 70 persen responden usia produktif tinggal dalam rumah tangga

tiga generasi, sebesar 50 persen responden tidak bekerja dan mayoritas perempuan, pendapatan responden yang bekerja baik di sektor formal maupun informal kurang dari Rp. 2.500.000,00 per bulan, hanya 11 persen responden yang memiliki persiapan untuk masa lansia mereka. Kondisi ini juga diperparah dengan pernyataan responden bahwa mereka akan bergantung pada keluarga atau anak dan pemerintah pada saat lansia nanti.

Di samping itu, penelitian ini juga memotret persepsi kelompok usia produktif terhadap lansia yakni: mereka secara umum melihat bahwa kondisi kehidupan lansia di Indonesia sudah baik, 80 persen lebih usia produktif berinteraksi dengan kelompok lansia, mayoritas kelompok usia produktif merasa bertanggung jawab merawat lansia, kelompok usia produktif tidak setuju lansia tinggal di panti werdha, terdapat 5 persen responden kelompok usia produktif yang pernah melihat secara langsung kekerasan terhadap lansia.

Oleh karena itu, The PRAKARSA sebagai lembaga penelitian dan advokasi kebijakan yang memperhatikan isu jaminan sosial ketenagakerjaan memandang perlunya melakukan penelitian secara khusus mengupas kondisi kelompok usia produktif dan kesiapan mereka menghadapi masa lansia dengan lebih komprehensif. Bagaimana kondisi kelompok usia produktif di Indonesia saat ini? Bagaimana persepsi kelompok usia produktif terhadap kelompok lansia saat ini dan persiapan mereka ketika menghadapi masa lansia? Dua pertanyaan ini yang hendak dijawab oleh laporan ini.

Penelitian ini dilakukan efektif berjalan lebih kurang 8 bulan, di 7 kabupaten/kota yang tersebar di wilayah Kota Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kota Kediri, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Mamuju dan Kabupate Polewali Mandar. Penelitian ini bagian dari program yang kami jalankan bekerja sama dengan VOICE Project (HIVOS). Kami sampaikan terima kasih kepada VOICE yang telah mendukung pendanaan penelitian ini. Secara khusus, kami atas nama The PRAKARSA menyampaikan apresiasi kepada tim peneliti di PRAKARSA: Eka Afrina Djamhari, Herni Ramdlaningrum, Aqilatul Layyinah, Adrian Chrisnahunama dan Darmawan Prasetya. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak termasuk KemenkoPMK, Kementerian PPN/Bappenas, BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah, Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, Dinas Sosial yang menerima peneliti dalam proses pengambilan data. Kontribusi Anda merupakan bentuk kepedulian bagi perbaikan pembangunan sumber daya manusia saat ini dan persiapan kelompok usia produktif menghadapi *ageing* di masa yang akan datang. Semoga kita mampu mempersiapkan dan menghadapi bonus demografi dengan sebaik-baiknya. Selamat membaca.

Jakarta, 24 November 2020

Ah Maftuchan

Direktur Eksekutif The PRAKARSA



A close-up photograph of a man with a mustache, wearing a white tank top, focused on working on a bicycle. He is in a workshop setting, with a blue and white patterned cloth visible in the background. The lighting is bright, highlighting his muscular physique and the details of the bicycle's frame and wheels.

Bab 1 Pendahuluan

Bonus demografi tidak secara otomatis dapat dinikmati oleh suatu negara, melainkan perlu upaya agar ketersediaannya bermanfaat dan dapat dipanen di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, perlu pemberian dukungan kepada kelompok usia produktif, seperti mengoptimalkan investasi dan pelatihan keterampilan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan membuka pasar kerja.

Foto oleh Hafis Ramadhan Setiawan



BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Populasi penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh penduduk usia produktif. Dalam sepuluh tahun mendatang, pada periode 2030 sampai 2040, Indonesia akan menikmati bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif, berusia 15–64 tahun, akan lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun (Bappenas, 2017). Perubahan demografi ini salah satunya dipengaruhi oleh perubahan ekonomi makro. Kondisi ekonomi yang semakin baik telah berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga sehingga pemenuhan kebutuhan dasar dapat tercukupi. Terjadinya peningkatan kualitas hidup di masyarakat juga merupakan dampak dari keberhasilan berbagai program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah dalam mengurangi risiko yang dihadapi kelompok rentan, seperti program jaminan kesehatan, bantuan tunai, dukungan biaya pendidikan, dan lain sebagainya (UNFPA, 2017). Namun, bonus demografi tidak secara otomatis dapat dinikmati oleh suatu negara, melainkan perlu upaya agar ketersediaannya bermanfaat dan dapat dipanen di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, perlu pemberian dukungan kepada kelompok usia produktif, seperti mengoptimalkan investasi dan pelatihan keterampilan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan membuka pasar kerja.

Kelompok usia produktif saat ini hidup dalam era revolusi industri 4.0 ketika peluang dan tantangan baru semakin bermunculan. Revolusi industri telah mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Manusia bahkan akan hidup dalam ketidakpastian global dan dituntut untuk memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan yang berubah sangat cepat. Di sisi yang lain, revolusi industri dinilai berdampak negatif dan



mengancam kelompok populasi produktif yang tidak memiliki cukup keterampilan akan tereksklusi dari pasar kerja. Ketika keterampilan tingkat tinggi menjadi prasyarat angkatan kerja untuk dapat bekerja, ancaman pengangguran merupakan hal nyata yang harus dihadapi oleh Indonesia.

Struktur pasar kerja yang mengalami pergeseran dari formal menjadi informal adalah tantangan tersendiri yang perlu disiapkan akibat dari era 4.0. Sebagai contoh, di satu sisi hadirnya platform transportasi *online* telah memberikan peluang kerja bagi sebagian angkatan kerja yang berusia muda, namun ternyata berdampak buruk pada sisi yang lain. Hal ini terjadi karena platform tersebut telah membuat sejumlah pekerja meninggalkan pasar kerja formal dan berpindah pada sektor informal yang di justru tidak memiliki perlindungan tenaga kerja. Dalam studi yang dilakukan Perkumpulan Prakarsa tahun 2017, ditemukan adanya penurunan kualitas kerja layak pada kelompok anak muda yang meninggalkan sektor formal dan berpindah pada perusahaan platform transportasi *online* yang notabene informal. Penurunan kualitas kerja layak yang dimaksud diantaranya adalah tidak ada pembatasan jam kerja, tidak ada standar upah, dan tidak ada perlindungan tenaga kerja.

Melihat struktur pasar kerja yang berkembang serta jumlah populasi produktif yang akan mencapai puncaknya di sepuluh tahun mendatang, penting untuk membaca ekspektasi penduduk usia produktif di masa depan. Selain itu, kondisi penduduk usia produktif juga perlu dilihat untuk mengetahui kesiapan dalam menghadapi masa lansianya. Jika tanpa persiapan yang baik, hal ini akan menjadi masalah dan beban bagi negara. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menyiapkan seperangkat kebijakan yang relevan dan efektif untuk menghadapi ledakan penduduk lansia di masa yang akan datang.

Research Gap

Persepsi seseorang terhadap hari tua berhubungan dengan pikiran dan persiapan yang dilakukan ketika muda. Semakin banyak informasi yang bisa didapatkan seseorang mengenai masa tua maka ia akan lebih mempersiapkan diri menghadapi masa tua. Penelitian Pradono dan Purnamasari menemukan bahwa individu yang berpikiran positif tentang masa pensiun maka ia akan lebih memiliki kesiapan mental dan emosi sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan sekitarnya (Pradono & Purnamasari, 2010).

Hurlock (dalam Wahidah, 2016) menyatakan bahwa status ekonomi yang baik dapat memungkinkan seseorang untuk hidup dengan nyaman dan menikmati hal-hal yang baik di masa tua (Wahidah, 2016). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kesiapan masyarakat dalam menghadapi masa tuanya. TNP2K dalam penelitiannya memperlihatkan bahwa diperlukan upaya untuk mempersiapkan masa lansia sejak dini, salah satunya melalui tabungan, jika ingin hidup layak di masa lansia (TNP2K, 2018).

Kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada saat ini belum mengatur jaminan pensiun untuk pekerja informal. Hal ini menyebabkan kelompok ini lebih rentan ketika menghadapi masa lansia. Oleh karena itu, PRAKARSA menilai penting untuk melakukan sebuah studi yang dapat melihat persepsi usia produktif terhadap masa lansia dan bagaimana kelompok usia produktif baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa lansia, terlepas dari status sosial dan ekonominya.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi kelompok usia produktif saat ini?
2. Bagaimana persepsi kelompok usia produktif terhadap kelompok lansia saat ini dan harapannya ketika menjadi lansia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis kondisi kelompok usia produktif saat ini.
2. Melihat persepsi kelompok usia produktif terhadap kelompok lansia saat ini dan harapannya ketika menjadi lansia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Adanya pemetaan mengenai kondisi kelompok usia produktif terhadap persiapannya untuk masa lansia.
2. Hasil studi dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan mengenai Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun bagi pekerja informal.
3. Hasil studi diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait dukungan bagi perempuan.

1.5 Metodologi Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan *mix method research* atau metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendekatan kuantitatif, data primer didapatkan melalui survei dengan bentuk pertanyaan tertutup. Survei dilakukan menggunakan *Open Data Kit (ODK) collect* untuk mempermudah pengambilan data, memperkecil kesalahan pengisian data, dan sebagai validasi wilayah pengambilan data. Data primer dikumpulkan melalui survei rumah tangga lansia sebanyak 1.400 responden. Kuesioner berisi pertanyaan yang mampu menggambarkan persepsi responden terhadap masa lansia dan persiapan yang telah dilakukan untuk menghadapi masa lansia. Data skunder diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan data-data hasil olahan dari BPS.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam atas sebuah fenomena. Pada pendekatan kualitatif, data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) mengenai kebijakan yang telah ada, baik di tingkat nasional maupun daerah. Wawancara mendalam dilakukan kepada sejumlah informan yang dipilih secara *purposive* yang kemudian berkembang secara *snowball* guna mendalami kasus-kasus yang lebih spesifik. Setelah wawancara dilakukan, triangulasi data pun diterapkan. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilihat dari berbagai sudut pandang hingga memperoleh kebenaran tingkat tinggi. Pemilihan kasus menarik didapatkan berdasarkan penilaian atau *judgement* atas informan yang akan digali lebih lanjut. Bias data sebisa mungkin dihindari pada saat pengumpulan dan analisis data (Babbie, 2010). Analisis data bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan pada kedalaman makna daripada generalisasi.

Metode yang digunakan untuk melakukan *literature review* atau tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah *systematic mapping study (scoping study)*. *Scoping study* adalah

adalah metode tinjau pustakayang sistematis dengan menggunakan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Mays et al (2001), scoping study bertujuan untuk memetakan secara cepat konsep-konsep kunci yang mendasari area penelitian dan sumber utama serta jenis bukti yang tersedia. Pemetaan konsep tersebut dapat digunakan untuk proyek yang berdiri sendiri, terutama untuk topik penelitian yang lebih luas/kompleks, atau belum pernah ditinjau secara komprehensif sebelumnya (Mays, Roberts, & Poppay, 2001). Pemilihan *paper* juga tidak dilakukan secara subyektif oleh peneliti, akan tetapi menggunakan protokol dan filter yang telah ditetapkan di depan. Hasilnya berupa klaster dan klasifikasi dari temuan-temuan yang didapatkan pada suatu topik penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi tren penelitian ke depan suatu topik penelitian.

b. Lokasi dan Responden Survei

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini memiliki beberapa kriteria, yaitu daerah yang memiliki jumlah populasi lansia yang cukup tinggi. Pemilihan sampling dimulai dengan pemilihan wilayah survei secara *purposive*. Dari statistik SUSENAS (Survei Sosial-Ekonomi Nasional), ditentukan 4 Provinsi yang akan menjadi basis studi adalah Sulawesi Barat, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta. Sulawesi Barat, Jawa Timur, dan Banten ditentukan berdasarkan pada pertimbangan dari estimasi Susenas (Maret 2017). Selanjutnya, pemilihan 7 kabupaten/kota berdasarkan beberapa kriteria, yakni *Dependency ratio* lansia, jumlah rata-rata angka kemiskinan, lansia hidup dalam 3 generasi, dan keterwakilan karakteristik wilayah desa dan kota. DKI Jakarta ditetapkan sebagai lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih komperhensif dan heterogen dibandingkan daerah yang lain. Berdasarkan kriteria di atas maka didapat lokasi dan jumlah responden penelitian pada tabel berikut:

Tabel 1 Lokasi dan jumlah responden survei

No	Provinsi	Tingkat	Kecamatan	Jumlah Responden per Kecamatan
1	Jawa Timur	Kabupaten Pacitan	Kec. Pacitan Kec. Kebonagung	200
		Kota Kediri	Kec. Kota Kec. Mojoroto	200
2	Banten	Kabupaten Pandeglang	Kec. Saketi Kec. Pulosari	200
		Kota Tangerang Selatan	Kec. Pamulang Kec. Serpong Utara	200

3	Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju	Kec. Mamuju Kec. Kalukku	200
		Kabupaten Polewali Mandar	Kec. Polewali Kec. Matakali	200
4.	DK Jakarta	Kota Jakarta Selatan	Kec. Pasar Minggu	200
Jumlah				1400

Sumber: olahan penelitian

Banyaknya responden dalam penelitian ini didapatkan dari perhitungan *power analysis* dengan *margin error* sebesar 5,5 persen. Selain itu, berdasarkan metode perhitungan ini, sebanyak dua Kabupaten/Kota dipilih untuk mewakili setiap provinsi yang menjadi basis penelitian. Secara teknis, pemilihan responden dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 1) Kelompok usia produktif yang hidup bersama anggota keluarga lansia dan menjadi penerima manfaat program perlindungan sosial maupun yang tidak. 2) Kelompok usia produktif yang tidak hidup bersama anggota keluarga lansia. Hal ini bertujuan untuk melihat perbedaan persepsi mengenai kehidupan lansia. Batasan usia produktif dalam penelitian ini yakni usia 18–59 tahun. Penelitian ini melibatkan 1.400 responden sebagai target survey, namun setelah dilakukan *cleaning* hanya 1.396 data dari hasil survei yang dapat digunakan untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Teknik Analisis Data

Setelah survei selesai dilakukan, data *charting* akan dikembangkan dan digunakan untuk mengekstraksi data dari setiap responden. Metode '*narasi review*' atau '*deskriptif analitis*' digunakan untuk mengekstraksi informasi yang berorientasi kontekstual atau proses dari setiap survei. Selanjutnya, kerangka analitik atau konstruksi tematik digunakan untuk memberikan gambaran luasnya literatur, tetapi bukan sintesis. Analisis numerik tingkat dan sifat studi menggunakan tabel dan grafik yang disajikan. Kemudian, analisis tematik akan disajikan sehingga kejelasan dan konsistensi laporan dapat dihasilkan. Analisis kuantitatif digunakan untuk melihat persepsi dan kesiapan usia produktif dalam masa lansianya. Tahap analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan setelah data didapatkan dari hasil wawancara, kemudian data dipilah berdasarkan klasifikasi informasi yang didapatkan dalam sebuah taksonomi. Analisis kualitatif digunakan untuk memperkuat hasil temuan survei.

1.6 Batasan Penelitian

Meskipun pemilihan lokasi dan responden di desain sedemikian rupa untuk mendapatkan gambaran dari seluruh populasi, penelitian ini memiliki keterbatasan

Bab 1

Pendahuluan

dalam hal komposisi sampel sehingga heterogenitas area Indonesia tidak dapat terwakili sepenuhnya. Secara demografi, responden usia produktif yang dipilih tidak memiliki komposisi yang sama dari setiap kelompok usia.



Bab 2 Literatur Studi Transisi Struktur Kerja dan Jaminan Ketenagakerjaan

Hadirnya platform *online* transportasi massal mampu memberikan peluang kerja bagi usia produktif, namun hal tersebut berdampak negatif bagi pekerja karena segala bentuk hak-haknya tidak terpenuhi. Dampak negatif yang timbul ini sejalan dengan studi yang pernah dilakukan PRAKARSA tahun 2017. Hasil studi menunjukkan adanya penurunan kualitas kerja layak bagi kelompok usia produktif yang berpindah haluan dari sektor formal ke sektor informal.

Foto oleh Farel Yesha



BAB 2

Literatur Studi Transisi Struktur Kerja dan Jaminan Ketenagakerjaan

2.1 Tren Pekerjaan di Era Revolusi Industri 4.0 dan Revolusi Industri 4.0

Indonesia merupakan salah satu negara dengan ketimpangan ekonomi dan sosial yang cukup tinggi. Ketimpangan dipicu berbagai hal, salah satunya karena terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan kerja layak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lebih dari 60 persen angkatan kerja di Indonesia berpendidikan SMP ke bawah, dan 45 persen dari total jumlah orang tidak bekerja berpendidikan SMP ke bawah. Ironisnya, lebih dari 60 persen orang yang tidak bekerja berada di usia muda dengan rentang usia dari 15 hingga 24 tahun. Namun pada saat yang sama, banyak industri yang kesulitan mendapatkan angkatan kerja yang kompeten yang sesuai dengan kebutuhan. Jika dibandingkan dengan profil angkatan kerja di ASEAN, profil angkatan kerja Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal keahlian dan kompetensi.

Revolusi Industri 4.0 telah mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Sayangnya, sebagian besar pekerjaan di era revolusi industri 4.0 menuntut adanya tenaga kerja terampil. Jika kelompok usia produktif tidak memiliki keterampilan yang memadai, mereka akan ter-*eksklusi* dari pasar kerja. Akibatnya, pengangguran menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Tuntutan penguasaan keterampilan membuat struktur pasar kerja menjadi bergeser. Berdasarkan data (BPS, 2020) jumlah pekerja informal saat ini mencapai 74,08 juta orang (57,27%) selama setahun terakhir (Februari 2018–Februari 2019).

Sebagai contoh, hadirnya platform *online* transportasi massal mampu memberikan peluang kerja bagi usia produktif, namun hal tersebut berdampak negatif bagi pekerja



karena segala bentuk hak-haknya tidak terpenuhi. Dampak negatif yang timbul ini sejalan dengan studi yang pernah dilakukan PRAKARSA tahun 2017. Hasil studi menunjukkan adanya penurunan kualitas kerja layak bagi kelompok usia produktif yang berpindah haluan dari sektor formal ke sektor informal. Pergeseran struktur pasar kerja yang kian berkembang pesat serta peningkatan populasi usia produktif hingga sepuluh tahun mendatang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menghadapi ledakan penduduk lansia yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2050. Harapannya, ledakan penduduk tersebut tidak menjadi beban negara di masa yang akan datang.

2.2 Tantangan dan Persiapan Menuju Lansia

2.2.1 Jebakan Kesenjangan Lanjut Usia

Saat seseorang memasuki masa lanjut usia (lansia) kesenjangan sosiologi (sosio) ekonomi dan gender masih terus berlanjut (OECD, Preventing Ageing Unequally, 2017). Hal ini dapat membuat seseorang dengan latar belakang sosio ekonomi bawah pada saat usia produktif akan cenderung memiliki masa lansia yang tidak sejahtera, terlebih jika tidak memiliki dukungan pensiun yang baik. Kesenjangan bermula dan berevolusi antargenerasi. Kondisi orang tua yang memasuki masa lansia tanpa dukungan pensiun cenderung menghasilkan generasi *sandwich*, yakni generasi yang secara finansial menanggung beban konsumsi orang tua dan keturunannya sendiri. Populasi generasi *sandwich* di Indonesia sampai tahun 2014 berada di 6,42 persen rumah tangga dari total populasi rumah tangga. Kondisi ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan ekspansi generasi berpendapatan menengah (Samudra & Wisana, 2016). Kesenjangan kelompok lansia dipengaruhi oleh kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Kondisi kesehatan yang baik akan memengaruhi seseorang untuk mendapatkan akses terhadap jenis pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Kondisi kesehatan sendiri juga dipengaruhi oleh latar belakang sosio ekonomi seseorang, semakin tinggi status sosio ekonomi seseorang maka semakin baik juga layanan kesehatan yang dapat diakses (OECD, *Preventing Ageing Unequally*, 2017). Studi yang dilakukan oleh Mulyanto, menyatakan bahwa layanan tingkat dua paling besar diakses oleh kelompok berpendapatan menengah ke atas dan berpendidikan tinggi. Selain distribusi layanan kesehatan tingkat dua masih terpusat di wilayah perkotaan, kemampuan untuk mengakses layanan rawat jalan juga masih belum terjangkau bagi kelompok berpendapatan menengah ke bawah di usia produktif (Mulyanto, Kringos, & Kunst, 2019). Selain itu, Indonesia masih belum memiliki skema preventif untuk penyakit yang tidak dapat dikomunikasikan (*non-communicable disease/NCDs*) seperti kardiovaskular. Skema layanan kesehatan yang ada lebih kepada layanan kuratif, hal ini membuat layanan preventif NCDs tergantung sumber daya individual untuk mengakses layanan tersebut.

Pendidikan memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kemampuan yang dapat digunakan untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik peluang pekerjaan dan pendapatan yang didapatkannya. Peningkatan keterampilan berkorelasi secara positif dengan lama seseorang bersekolah. Pendidikan sampai tingkat sarjana akan berdampak pada peningkatan *supply* pekerja berketerampilan tinggi dengan peluang lapangan kerja yang lebih baik dibandingkan dengan lulusan sekolah menengah (Suryahadi, Asep, Widyanti, Perwira, & Sumarto, 2010). Akses terhadap pendidikan juga dipengaruhi oleh kondisi sosio ekonomi suatu keluarga. Rumah tangga yang memiliki pendapatan lebih tinggi cenderung mampu membiayai pendidikan tinggi anggota keluarganya (Cho & Heshmati, 2015). Hal ini berimplikasi pada *supply* tenaga kerja terampil yang lebih terpusat dari kalangan rumah tangga berpendapatan menengah ke atas. Tentu, kondisi tersebut membuat generasi dari keluarga menengah ke bawah akan sedikit mendapatkan peluang pendidikan yang lebih tinggi dan cenderung mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang rendah.

Jenis pekerjaan berpengaruh terhadap pendapatan seseorang untuk memenuhi konsumsinya. Pekerjaan di sektor formal umumnya memiliki kontrak kerja, terlindungi jaminan kesehatan dan jaminan ketenaga kerjaan. Berbeda dengan pekerjaan di sektor informal yang cenderung lebih fleksibel. Jenis-jenis pekerjaan informal sangat beragam yang mencakup pekerja paruh waktu dan wisausaha (OECD, *Publication Pension at a Glance 2019: OECD and G20 indicators*, 2019). Pekerja informal cenderung memiliki pendapatan yang tidak tetap dan dapat saja berubah-ubah karena fleksibilitas kerja dan berdampak pada aset yang dimiliki. Aset merupakan akumulasi dari pendapatan bersih yang tidak dihabiskan pada konsumsi jangka pendek dan dapat digunakan untuk mendukung konsumsi pada masa lanjut usia (lansia) (Lee & Mason, 2011)

2.2.2 Jaminan Pensiun Sebagai Usaha Meminimalisasi Kesenjangan

1. Konsep Sistem Pensiun

Garis pendapatan seseorang dapat berakhir dalam kurun waktu tertentu, namun garis konsumsi akan terus berlanjut sampai akhir hayat. Kondisi ini yang membuat seseorang dapat terjebak dalam situasi konsumsi tanpa pendapatan yang pada akhirnya mengakibatkan seseorang semakin miskin dan rentan terjadi kelompok lansia. Jaminan pensiun bertujuan membantu seseorang untuk mengatur pendapatan dan menjaga konsumsi di masa lansia. Secara umum, sistem pensiun terbagi dalam dua sistem utama sebagai berikut:

Tabel 2 Jenis dan karakteristik sistem pensiun

Karakteristik Kelembagaan	Publik	Swasta
Keanggotaan	Wajib	Sukarela
Skema pendanaan	<i>Pay-as-you-go (PAYG)</i>	<i>Fully-funded (FF)</i>
Besaran manfaat/transfer	Berdasarkan rata-rata penghasilan sebelumnya	Berdasarkan kontribusi
Cakupan perlindungan	Garansi Minimum, mean-tested, manfaat tetap (<i>flat benefit</i>)	Sesuai penghasilan
Efek distibusiional	Redistributif	Aktuarial

Sumber: Diolah dari (Ståhlberg, 2005)

Tabel di atas menggambarkan karakteristik jaminan pensiun yang dijalankan oleh berbagai negara di dunia. Kelembagaan mengacu pada pengelolaan sistem pensiun oleh lembaga publik ataupun lembaga swasta. Karakteristik sistem pensiun seperti di atas jarang sekali ditemui dalam sistem dan karakteristiknya secara murni. Seringkali dilakukan pencampuran sistem dan menyesuaikannya dengan konteks suatu negara. Skema keanggotaan berkaitan erat dengan sistem risk pool dalam sistem pensiun, yakni sistem pensiun perlu mendistribusikan sumber daya dan risiko kepada setiap anggota yang terjamin. Skema pendanaan *Fully-funded (FF)* mengacu pada besaran manfaat yang didapatkan saat pensiun berdasarkan pembayaran kontribusi sebelumnya. Skema pendanaan *Pay-as-you-go (PAYG)* merujuk pada manfaat yang didapatkan oleh kelompok lansia saat ini bersumber dari kontribusi angkatan kerja yang ada, skema ini sangat bergantung pada dukungan antargenerasi.

Besaran manfaat berdasarkan kontribusi adalah jumlah transfer atau manfaat yang diterima pada masa pensiun lalu disesuaikan dengan jumlah besaran kontribusi yang dibayarkan oleh seseorang ditambah dengan akumulasi nilai tambah dari investasi kontribusi. Sedangkan, besaran manfaat berdasarkan rata-rata pendapatan sebelumnya

mengacu pada sistem pensiun yang mencatat besaran rata-rata pendapatan setiap bulan sebelum pensiun. Perlindungan berdasarkan penghasilan mengacu pada skema semakin besar penghasilan yang dilaporkan akan berpengaruh pada cakupan fasilitas dan manfaat asuransi. Selain menjalankan fungsi jaminan, skema pensiun juga perlu memperhatikan skema redistribusi, terutama pensiun yang dijalankan oleh lembaga publik (Stiglitz & Rosengard, 2015). Fungsi redistribusi mengacu pada skema yang memberikan transfer secara proporsional kepada individu yang sebelumnya secara sosio ekonomi dan gender terdeprivasi, seperti kondisi miskin dan menjadi pekerja domestik tidak dibayar, contohnya perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangga (Ibu rumah tangga).

Efek distribusional bergantung pada sistem pensiun yang dibangun dalam suatu negara. Dua hal penting untuk mempertimbangkan efek distribusional yaitu manfaat dan skema kontribusi sistem pensiun. Dampak redistribusional erat kaitannya dengan pendapatan, kondisi kesehatan, angka harapan hidup, pekerjaan, dan jenis kelamin. Seseorang dengan pendapatan yang lebih besar memiliki peluang lebih besar pula dalam mengakses fasilitas kesehatan yang lebih baik dan dapat berimplikasi pada naiknya angka harapan hidup pada kelompok berpendapatan tinggi. Dengan demikian, jika sistem pensiun menyamakan manfaat antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah maka akan menghasilkan efek redistribusi yang lebih menguntungkan kelompok pendapatan tinggi.

Sistem yang menyamakan batasan usia untuk menerima manfaat antara lansia laki-laki dan perempuan akan menghasilkan efek redistribusi yang lebih kepada perempuan. Seperti halnya perempuan yang cenderung memiliki usia lebih panjang dari pada laki-laki. Selain itu, sistem pensiun yang memberikan batasan usia untuk menerima manfaat yang lebih awal kepada perempuan dibandingkan laki-laki akan menghasilkan dampak redistribusi yang lebih juga terhadap perempuan. Pada skema perhitungan aktuarial, perempuan akan mendapatkan manfaat yang lebih sedikit jika masa kontribusi lebih sedikit atau pengambilan manfaat pensiun yang lebih dini. Kondisi ini menuntut adanya perhitungan bukan hanya dampak redistribusi kepada kelompok tertentu, namun juga perlu mempertimbangkan perhitungan aktuarial. Seperti halnya, menaikkan atau memperkecil manfaat bagi kelompok berpendapatan lebih banyak karena konsumsi atas manfaat mereka lebih panjang daripada kelompok miskin.

2. Reformasi Jaminan Pensiun

Analisis kesenjangan tingkat kesejahteraan pada usia produktif dapat menjadi dasar perlunya reformasi jaminan pensiun sebagai persiapan memasuki masa lansia nantinya. Skema reformasi pensiun yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam *Pension at Glance 2019* memfokuskan pada sistem pensiun yang melibatkan pekerja non-standar atau pekerja di sektor informal dalam skema pensiun. Jenis pekerjaan di sektor informal di Indonesia mencakup

kegiatan wirausaha, pekerja bebas, pekerjaan yang dibantu buruh tidak tetap, pekerja yang tidak dibayar, pekerja paruh waktu, serta pekerja kontrak (BPS, Statistik Pemuda Indonesia 2019, 2019).

Sistem pensiun di Indonesia masih terfokus pada pekerja di sektor formal yang menyebabkan isu batasan usia untuk pensiun bagi pekerja di sektor informal menjadi semakin abu-abu. Kerangka reformasi sistem pensiun yang dikembangkan oleh OECD dalam *Pension at Glance 2019* menjadi relevan untuk digunakan dalam konteks Indonesia. Kerangka yang dikembangkan OECD ini menitikberatkan pada tiga aspek utama sebagai dasar reformasi sistem pensiun.

Penelitian ini menggunakan dua aspek dasar reformasi yang disesuaikan dengan urgensi reformasi pensiun di Indonesia, yakni:

1. Perluasan cakupan. Kelayakan seseorang untuk memasuki sistem pensiun secara umum ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang membuat kontribusi pensiun harus ditanggung oleh siapa. Sistem ini dapat mengeksklusi pekerja yang tidak memiliki ikatan kontrak kerja layaknya pekerja formal. Kemudahan untuk mengakses jaminan pensiun tentunya perlu memperhatikan persyaratan minimum jam kerja, persyaratan minimum pendapatan, dan kontrak kerja. Pelonggaran terhadap tiga hal tersebut dapat memungkinkan pekerja di sektor informal dapat masuk dalam sistem pensiun.
2. Kewajiban keanggotaan. Seluruh masyarakat diwajibkan untuk masuk dalam sistem pensiun, terlepas pekerja di sektor formal maupun informal. Hal ini memiliki dua alasan penting. Pertama, untuk meminimalisasi perilaku *miopik* masyarakat dalam melihat risiko yang akan dihadapi pada saat memasuki masa lansia, padahal baik pekerja di sektor formal dan informal sama-sama memiliki risiko tidak dapat bekerja. Kedua, mewajibkan keanggotaan dapat menciptakan skema *pool risk* yang memungkinkan sumber daya yang berasal dari kontribusi dan manfaat jaminan pensiun dapat terdistribusi kepada seluruh anggota.

2.3 Payung Hukum Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun

2.3.1 Undang-Undang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan menjadi isu penting di Indonesia. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Hal-hal terkait Ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun dalam UU sudah menyingung mengenai pekerja paruh waktu, UU tersebut belum mengatur pekerja yang bekerja secara fleksibel mengingat tren pekerja saat ini yang bergeser

sesuai dengan perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0. Jaminan sosial tenaga kerja disebut dalam pasal 8 mengenai informasi Ketenagakerjaan, tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut dan diatur dalam UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

2.3.2 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Pada 2004 pemerintah mengesahkan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU ini sebagai dasar untuk mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta. SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Program Jaminan Pensiun dalam UU SJSN merupakan sebuah program asuransi sosial tabungan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang nama programnya sekarang berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan manfaat pasti. Tujuannya untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

2.3.3 Peraturan Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun

Untuk menjalankan amanat UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dibentuklah sebuah badan penyelenggara yang diatur dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pasal 64 menyebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian bagi peserta, selain peserta program yang dikelola PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero), sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) akan menyelesaikan pengalihan programnya ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Dengan terbentuknya BPJS, jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.

Turunan kebijakan lainnya mengenai jaminan ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT). Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa setiap pemberi kerja, selain penyelenggara negara, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan. Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program JHT adalah manfaat uang

tunai yang diberikan ketika peserta memasuki usia tertentu, tidak ingin bekerja lagi, cacat total sehingga tidak mampu bekerja kembali, atau meninggal dunia. Manfaat JHT merupakan nilai akumulasi Iuran beserta hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta. Dalam PP ini diatur mengenai pengertian JHT, kepesertaan, tata cara pendaftaran, besarnya Iuran, tata cara pembayaran Iuran, manfaat program JHT, mekanisme pembayaran manfaat JHT, sanksi administratif, pengawasan, dan penanganan keluhan. Peraturan tersebut dinilai belum mengakomodasi kondisi ketenagakerjaan secara nasional, khususnya yang mengatur mengenai pembayaran manfaat JHT kepada peserta yang berhenti bekerja. Oleh karena itu, disahkanlah PP No. 60 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua.

Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun disebutkan jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total, atau meninggal dunia. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. Peserta Program Jaminan Pensiun yang dimaksud adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran.

Melalui UU dan PP tersebut, penyelenggaraan jaminan sosial yang selama ini berjalan sendiri-sendiri dan hanya menjangkau sekelompok kecil masyarakat harapannya dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas. Namun, kenyataannya kebijakan ini belum sepenuhnya mampu mengakomodir pekerja dari sektor informal atau yang bekerja sendiri tanpa dibantu orang lain karena skema pembayaran iuran yang ditawarkan selama ini dilakukan oleh pekerja dan pemberi kerja.

2.4 Pembelajaran dan Pengalaman Skema Jaminan Pensiun dari Negara Lain

Perspektif internasional untuk merespons isu kelanjutusiaan dan skema pembiayaan pensiun dapat memperluas pemahaman dalam perumusan kebijakan. Tantangan kelanjutusiaan secara ekonomi dapat menjadi hal baru terutama bagi suatu negara yang baru atau akan menghadapi transisi demografi ke usia tua (Lee & Mason, 2011). Negara-negara Amerika Latin dipilih sebagai pembelajaran karena memiliki karakteristik sebagai negara berkembang dan sedang mengembangkan sistem jaminan pensiun sosial bagi lansia sebagai upaya penurunan kemiskinan penduduk lansia. Sistem pensiun sosial yang telah diterapkan diharapkan mampu menjadi *lesson-learned* bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem pensiun bagi pekerja informal.

1. Cakupan Keanggotaan

Brazil mengembangkan sistem kontributif dan non-kontributif. Sistem kontributif dibagi menjadi dua, yakni program perlindungan sosial khusus yang diperuntukkan bagi pegawai negeri dan program perlindungan umum yang diperuntukkan bagi pekerja di sektor swasta dan petani di wilayah perdesaan atau nelayan. Sistem non-kontributif diperuntukkan bagi kelompok lansia yang miskin dan/atau disabilitas. Sampai pada tahun 2014, tiga skema keanggotaan tersebut telah menjangkau 89,2 persen seluruh kelompok lansia yang ada di Brazil .

Pendekatan berbeda digunakan oleh China dalam melakukan perluasan cakupan keanggotaan pensiun. Terdapat lima jenis skema keanggotaan pensiun yang dilakukannya, yakni *pensiun pribadi* yang diperuntukkan bagi karyawan perusahaan, *pensiun publik* diperuntukkan bagi pegawai negeri, *pensiun off-duty* yang diperuntukkan bagi veteran, *pensiun kota-desa* yang diperuntukkan bagi penduduk kota maupun desa yang tidak masuk dalam kategori-kategori sistem pensiun lainnya, dan *pensiun tambahan* yang diperuntukkan bagi petani yang kehilangan lahan dan pensiunan kolektif atau kelompok. Sampai tahun 2013, cakupan keanggotaan penerima pensiun sudah mencapai 76 persen (Li, Wang, Yuan, & Xu, 2018).

Jepang menggunakan skema usia sebagai basis keanggotaan. Pendekatan usai merujuk pada batasan minimum seseorang harus tergabung dalam sistem pensiun dan pada usia berapa seseorang dapat menarik manfaat pensiun. Seseorang yang tinggal di Jepang dalam rentang usia 20 sampai 60 tahun perlu berkontribusi dalam skema pensiun nasional. Namun, jika seseorang dalam usia 20 sampai 60 tahun nantinya mendapatkan pekerjaan di perusahaan atau menjadi pegawai negeri, seseorang akan dikenakan tambahan premi/kontribusi dari pensiun nasional yang nantinya juga berimplikasi pada jumlah manfaat yang lebih besar. Dua skema pensiun ini diperuntukkan bagi warga Jepang maupun warga asing yang tinggal di Jepang dan bekerja dalam kurun waktu tertentu. Hanya saja, bagi warga negara asing, manfaat pensiun akan dibayarkan secara *lump-sum* (Committee, 2020).

2. Pembiayaan dan kontribusi

Brazil menerapkan sistem pembiayaan *pay-as-you-go* (PAYG), Meksiko dan Chili menerapkan skema pembiayaan *fully-funded* (Aguila, Mejia, Perez-Arce, Ramirez, & Rivera Illingworth, 2016). Skema pembiayaan PAYG di Brazil menggunakan dana gabungan dari skema kontribusi potongan gaji dan pajak negara yang diambil dari pajak pendapatan perusahaan, pajak barang dan jasa. Namun, untuk skema pembiayaan pensiun warga desa menggunakan pajak penjualan barang hasil panen. Di sisi lain, Meksiko menggunakan skema kontribusi FF yang mensyaratkan pembayaran kontribusi minimal 25 tahun dan akan mendapatkan manfaat berupa garansi minimum pensiun sesuai standar gaji minimum negara. Bagi yang ingin pensiun dini harus memenuhi akumulasi kontribusi 130 persen dari minimum gaji di Meksiko.

Tingginya prevalensi pekerja di sektor informal menjadi tantangan bagi setiap negara berkembang untuk mengembangkan sistem pensiun. Melguizo menggabungkan analisis tentang informalitas pekerjaan dengan semakin meningkatnya kelas menengah sebagai dampak keberhasilan program pengentasan kemiskinan sebelumnya di wilayah Amerika Latin dan Karibia dalam mengembangkan skema pensiun (Melguizo, 2015). Studi tersebut menyatakan perlu adanya subsidi kontribusi bagi semua kelas dengan kriteria kontributor adalah berpenghasilan di atas minimum standar upah negara. Hal ini diharapkan mampu mendorong kelas menengah untuk dapat masuk dalam skema jaminan pensiun. Skema subsidi ini disesuaikan dengan jumlah penghasilan yang berarti semakin tinggi penghasilan akan semakin rendah pula subsidi.

Program pensiun non-kontributif di negara-negara Amerika Latin terbukti meningkatkan cakupan keanggotaan pensiun kepada kelompok lansia. Sejak tahun 2002–2015 cakupan pensiun bagi kelompok lansia di wilayah ini meningkat dari 53,6 persen menjadi 70,8 persen dan berkembang dari delapan negara menjadi 26 negara yang melaksanakan program ini (FIAP, 2018). Implementasi program pensiun non-kontributif ini juga berdampak pada pengurangan angka kemiskinan ekstrem di Brazil sebesar 0,4 persen (Paiva, 2016). Di Meksiko program ini terbukti berdampak pada peningkatan kesehatan jangka panjang bagi perempuan dan meningkatkan belanja pada layanan kesehatan, obat-obatan, dan makanan pokok. Cakupan program ini juga berbeda-beda, negara seperti Bolivia menerapkan skema universalitas sebagai sasaran populasi program dengan alasan mempermudah administrasi, sedangkan Brazil menysasar pada kelompok lansia yang tinggal di wilayah perdesaan sebagai sasaran program perlindungan pensiun non-kontributif (FIAP, 2018).

3. Manfaat Jaminan Pensiun

Manfaat pensiun dapat menjadi daya tarik seseorang untuk tergabung dalam skema pensiun, terutama jika besaran manfaat disesuaikan dengan minimum gaji dalam suatu negara. Manfaat pensiun dapat dikategorikan dalam dua tujuan, yakni sebagai perlindungan sosial yang dimaksudkan supaya seseorang pada masa lansia tidak jatuh miskin atau sebagai usaha mempertahankan pendapatan. Brazil menerapkan skema *flat-rate* bagi penerima manfaat pensiun non-kontributif, yakni sebesar satu kali upah minimum negara. Bagi seorang yang tergolong pensiun kontributif akan dikenakan skema *earning-related* yang berarti semakin besar kontribusi sebelumnya semakin besar pula manfaatnya (Paiva, 2016).

Arza dalam studinya mengaitkan besaran manfaat dengan isu cakupan keanggotaan dan prevalensi pekerja lansia di negara-negara Amerika Latin (Arza, 2019). Studi ini membagi sistem pensiun di negara-negara Amerika Lantin dalam tiga kelompok, yakni kelompok *kontribusi plus*, universal minimum, dan *mean-tested* untuk penghapusan kemiskinan. Di negara dengan kategori *kontribusi plus*, skema pensiun kontributif diharmonisasikan dengan yang non-kontributif, seperti Brazil yang menambah skema keanggotaan bagi

Bab 2

Literatur Studi Transisi Struktur Kerja dan Jaminan Ketenagakerjaan

lansia di desa dan petani dengan memberikan manfaat satu upah minimum negara kepada seluruh penerima manfaat pensiun. Skema pensiun *universal minimum* mengacu pada skema manfaat pensiun yang diberikan kepada seluruh penduduk lansia dengan jumlah manfaat yang relatif sedikit. *Mean-tested* hanya ditujukan kepada kelompok lansia miskin seperti di Kolombia yang memberikan jumlah manfaat yang minim dan hanya diberikan kepada kelompok lansia miskin.

A photograph of a group of people on a boat deck. A man in blue shorts stands on a high structure, looking out. Other people are sitting or leaning on the railings. The boat has a blue hull and white upper structure. The text 'KEMBUNGA MATE...' is visible on the side of the boat.

Bab 3

Hasil Temuan: Kondisi, Persepsi, dan Harapan Usia Produktif

Tantangan kemiskinan dan kesenjangan pada penduduk lansia dapat bermula sejak seseorang berusia muda. Analisis terhadap kondisi usia produktif dapat memberikan gambaran terkait pangkal dan faktor-faktor yang memengaruhi kelompok usia produktif rentan terhadap kondisi miskin saat memasuki masa lansia.

Foto oleh Achmad Al Fadhli



BAB 3

Hasil Temuan: Kondisi, Persepsi, dan Harapan Usia Produktif

3.1 Kondisi Kelompok Usia Produktif

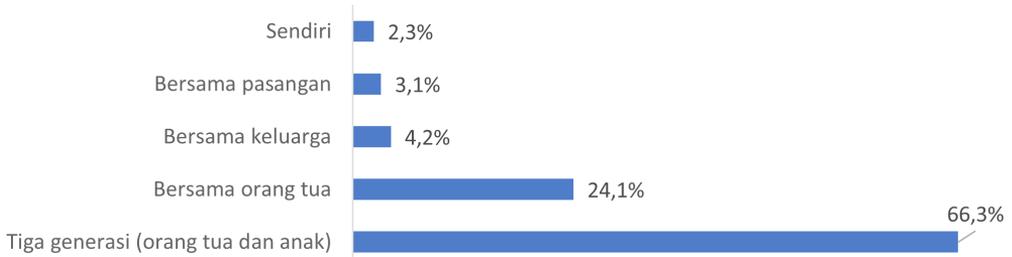
Tantangan kemiskinan dan kesenjangan pada penduduk lansia dapat bermula sejak seseorang berusia muda. Analisis terhadap kondisi usia produktif dapat memberikan gambaran terkait pangkal dan faktor-faktor yang memengaruhi kelompok usia produktif rentan terhadap kondisi miskin saat memasuki masa lansia. Penelitian ini melibatkan 1.400 responden kelompok usia produktif sebagai target survei, namun setelah dilakukan *cleaning* hanya 1.396 data dari hasil survei yang dapat digunakan untuk dianalisis lebih lanjut. Berikut analisis mengenai kondisi kelompok usia produktif.

a. Status Tinggal

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh kelompok usia produktif adalah menjadi generasi *sandwich*. Tan mendefinisikan generasi *sandwich* sebagai generasi yang tinggal bersama atau berdekatan dengan anak maupun orang tua. Definisi ini dibagi menjadi tiga, yakni: orang yang tinggal bersama orang tua dan anak dalam satu rumah, orang yang tinggal pada rumah yang berdekatan antara rumah anak dan rumah orang tua, dan orang yang tinggal dalam satu rumah atau yang memberikan dukungan dalam bentuk finansial maupun bantuan fisik kepada orang tua dan anak (Tan, 2018). Tiga definisi tersebut menyangkut tentang status tinggal kelompok usia produktif serta beban tanggungan yang ditanggung dan dapat berdampak pada tantangan penambahan beban finansial kelompok usia produktif dalam suatu rumah tangga. Penelitian ini mencoba mengungkap keterkaitan isu generasi *sandwich* dengan status tinggal. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa kelompok usia produktif memiliki status tinggal sebagai berikut:



Grafik 1 Status tinggal responden



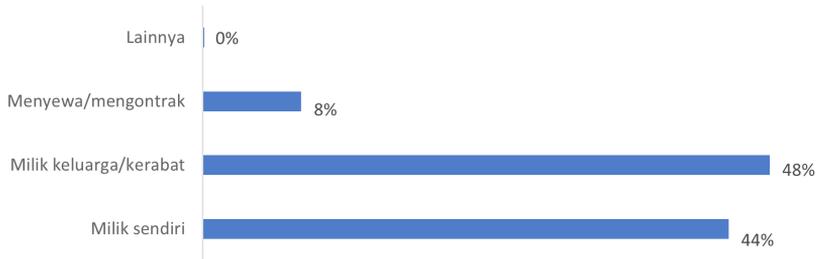
Sumber: olahan hasil survei

Grafik di atas menunjukkan sebanyak 66% kelompok usia produktif tinggal di rumah tangga tiga generasi, sebanyak 24% tinggal bersama keluarga, sedangkan status tinggal bersama keluarga, pasangan, dan sendiri hanya sebesar 10%. Hal ini menunjukkan masih tingginya prevalensi kelompok usia produktif yang tinggal dalam rumah tangga tiga generasi di Indonesia. Berdasarkan status kepemilikan rumah yang ditinggali oleh responden saat ini terbagi sebagai berikut, sebanyak 56% responden menyatakan status rumah yang ditinggali saat ini bukan milik sendiri yakni milik keluarga dan mengontrak dan 44% responden tinggal di rumah milik sendiri.

Bab 3

Hasil Temuan: Kondisi, Persepsi, dan Harapan Usia Produktif

Grafik 2 Status kepemilikan rumah

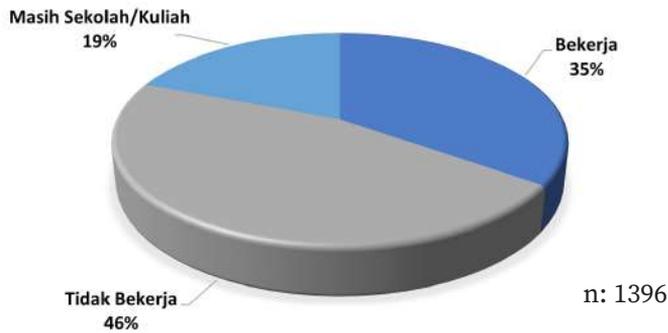


Sumber: olahan hasil survei

b. Pekerjaan dan Pendapatan

Dilihat dari aktivitas responden kelompok usia produktif, menunjukkan bahwa:

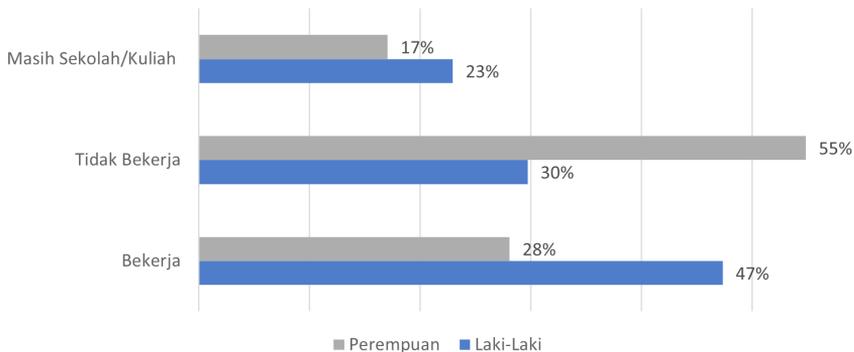
Grafik 3 Persentase aktivitas responden



Sumber: olahan hasil survei

Sebanyak 46% responden tidak bekerja atau pengangguran, sebanyak 35% bekerja, dan 19% masih sekolah/kuliah untuk responden berusia antara 18–22 tahun. Dilihat berdasarkan gender, responden yang tidak bekerja didominasi oleh perempuan, dapat dilihat pada grafik berikut:

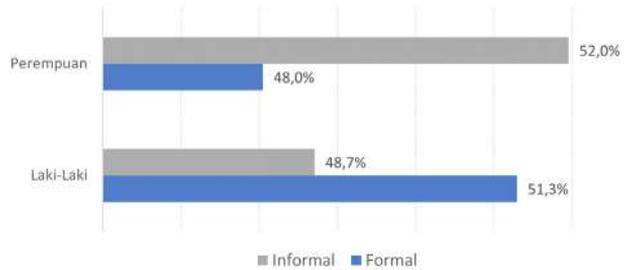
Grafik 4 Persentase aktivitas responden berdasarkan jenis kelamin



Sumber: olahan hasil survei

Sebanyak 47% responden laki-laki memiliki status bekerja. Responden perempuan yang tidak bekerja sebanyak 25% lebih banyak dibandingkan responden laki-laki yang tidak bekerja. Dari responden yang bekerja, sebanyak 50,4% bekerja di sektor formal. Dilihat dari jenis pekerjaan berdasarkan gender dapat dilihat sebagai berikut:

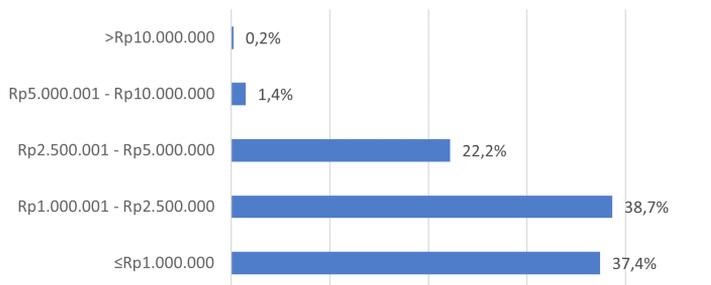
Grafik 5 Persentase jenis pekerjaan responden menurut jenis kelamin



Sumber: olahan hasil survei

Grafik di atas menunjukkan laki-laki lebih banyak bekerja di sektor formal, sedangkan perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal. Berdasarkan jenis pekerjaan, baik laki-laki maupun perempuan paling banyak bekerja sebagai wirausaha, karyawan swasta, pedagang, dan buruh harian. Jenis pekerjaan berkaitan dengan jumlah pendapatan yang dihasilkan.

Grafik 6 Distribusi pendapatan responden bekerja



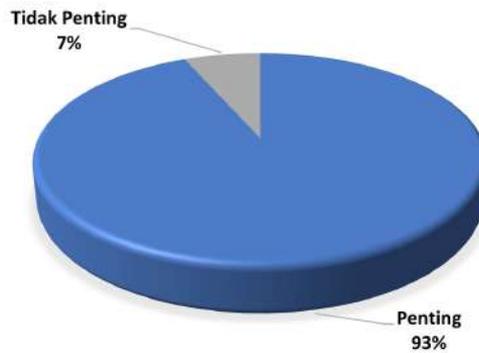
Sumber: olahan hasil survei

Pendapatan responden paling banyak di bawah Rp2.500.000,00 per bulan. Dilihat berdasarkan jenis pekerjaan secara sektoral (formal dan informal), sebanyak 47 persen pekerja informal terkonsentrasi pada pendapatan < Rp1.000.000,00 per bulannya, sedangkan pada kelompok pendapatan Rp2.500.001,00—Rp5.000.000,00 didominasi oleh pekerja formal. Rendahnya pendapatan saat masih muda dapat berimplikasi pada lemahnya persiapan untuk memasuki hari tua dan rentan miskin saat masa lansia (OECD, Preventing Ageing Unequally, 2017). Perilaku miopia (rabun jauh terhadap risiko mendatang) menjadi tantangan generasi produktif dalam mempersiapkan masa lansia (Foster, 2017).

c. Kepemilikan Jaminan Hari Tua atau Jaminan Pensiun

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi akses terhadap jaminan sosial. Jaminan sosial adalah upaya pengurangan risiko melalui pemberian tunjangan pendapatan (upah) untuk menekan dampak risiko yang terjadi kepada masyarakat dan/ atau penanggung biaya ketika sakit, kecelakaan saat bekerja, kelahiran, usia lanjut, dan kematian untuk pekerja. Pandangan responden mengenai pentingnya jaminan hari tua atau pensiun sangat baik, sebanyak 93 persen responden menjawab jaminan sosial hari tua atau pensiun penting. Hanya 7 persen responden yang menyatakan jaminan hari tua atau pensiun tidak penting.

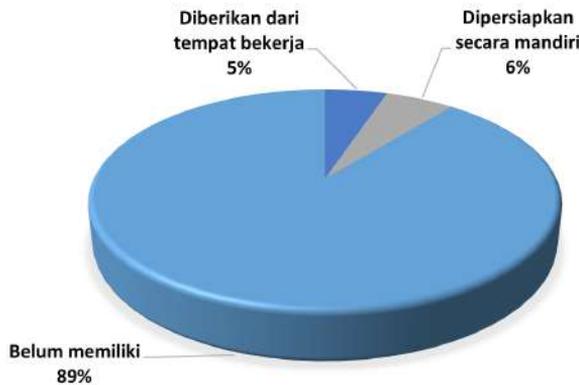
Grafik 7 Pentingnya asuransi hari tua atau pensiun



Sumber: olahan hasil survei

Informasi ini menunjukkan bahwa responden mengetahui pentingnya jaminan hari tua, tetapi hal ini tidak selaras dengan kepemilikan JHT/JP atau persiapan yang telah dilakukan responden. Berikut ini adalah kepemilikan persiapan untuk masa lansia yang telah dilakukan oleh responden penelitian:

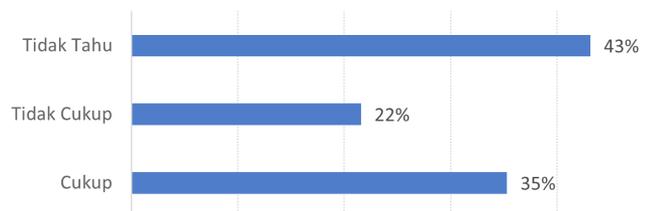
Grafik 8 Kepemilikan persiapan hari tua atau masa lansia



Sumber: olahan hasil survei

Hanya 11% yang menyatakan telah memiliki persiapan hari tua atau masa lansia, sebanyak 5% responden mendapatkan jaminan ini dari tempatnya bekerja di sektor formal dan hanya 6% pekerja di sektor informal yang memiliki persiapan hari tua atau masa lansia secara mandiri. Dari 6% pekerja informal yang memiliki persiapan hari tua atau masa lansia, hampir 40% menjawab persiapan yang dipilih yakni berupa tabungan atau investasi. Masyarakat merasa lebih mudah untuk menyetor pendapatan mereka dengan cara menabung atau investasi untuk mereka gunakan pada saat mereka memasuki masa tua. Dengan konsekuensi yang juga mereka sadari, terkadang mereka menggunakan tabungan tersebut apabila terjadi kondisi atau situasi sulit. Terdapat 11% total populasi yang menyatakan telah memiliki persiapan hari tua atau masa lansia adalah pekerja dengan pendapatan di atas Rp2.500.000,00. Sebanyak 43% responden menyatakan tidak tahu apakah persiapan yang telah mereka lakukan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di masa lansia, 35% responden merasa persiapan tersebut akan mencukupi kebutuhan hari tuanya, dan 22% menyatakan tidak cukup.

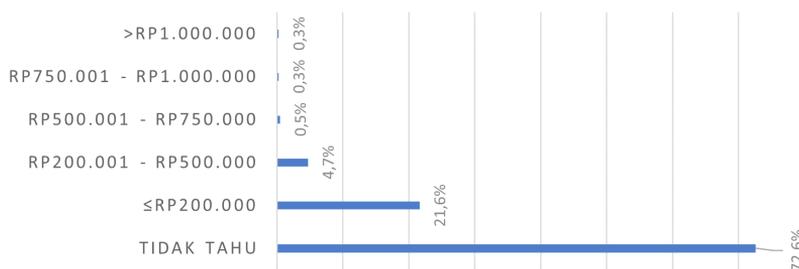
Grafik 9 Pengetahuan mengenai kecukupan atas jaminan hari tua/pensiun yang dimiliki



Sumber: olahan hasil survei

Pertanyaan mengenai, “Apakah persiapan yang mereka lakukan dapat memenuhi kebutuhan di masa lansia?” di atas membuat peneliti akhirnya melakukan pendalaman dengan pertanyaan mengenai *berapakah kemampuan yang sanggup mereka sediakan atau sisihkan untuk mempersiapkan hari tua?* Responden tidak cukup memiliki komitmen untuk menyetorkan pendapatannya untuk mempersiapkan masa lansia. Mayoritas responden atau sebanyak 73% menjawab tidak tahu tentang berapa nominal yang dapat disisihkan untuk mempersiapkan hari tua dan 22% responden menyatakan sanggup membayar pada kisaran Rp200.000,00—Rp500.000,00 per bulan.

Grafik 10 Jumlah nominal yang disisihkan untuk hari tua



Sumber: olahan hasil survei

Mengenai nominal jaminan hari tua atau pensiun untuk hidup layak di hari tua, TNP2K (2019) menyatakan jika seorang pekerja/individu berusia 25 tahun (tahun 2018) ingin memiliki pensiun per bulan sebesar Rp1.200.000,00 (sedikit di atas garis kemiskinan di tahun 2053). Agar keinginannya tercapai maka dia harus memiliki tabungan pensiun sebesar Rp162.237.719,00 pada saat berusia 60 tahun. Artinya selama sisa waktu kerjanya (sekitar 35 tahun) dia harus menabung sebesar Rp718.348,00 per bulannya. Namun, jika dilihat berdasarkan hasil survei nominal ini akan sulit dipenuhi.

Kepada responden yang menyatakan tidak memiliki persiapan jaminan hari tua atau pension, survei menanyakan bagaimana kebutuhan kehidupan mereka dapat dipenuhi ketika mereka lansia. Mayoritas responden atau sebanyak 37% menyampaikan bahwa mereka akan bergantung kepada keluarga dan anak, 28% menyampaikan tidak tahu. Sejumlah 35% sisanya menyatakan akan bergantung kepada pemerintah dan lainnya. Sebuah penelitian (United Nations, Departement of Economic and Social Affairs, Population Division, 2019) menjelaskan secara umum bahwa lansia mendanai konsumsi mereka dari empat sumber yang berbeda: (1) Program publik seperti jaminan pensiun, perawatan kesehatan, dan program kesejahteraan sosial lainnya, (2) transfer dari anggota keluarga atau sumber pribadi lainnya, (3) memiliki aset dan kekayaan, dan (4) pendapatan dari hasil kerja mereka sendiri.

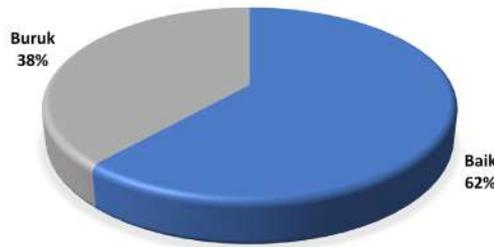
3.2 Persepsi Kelompok Usia Produktif terhadap Kehidupan Lansia

Persepsi generasi produktif terhadap kondisi kehidupan lansia perlu dipahami sebab bertujuan untuk mendapatkan informasi sampai sejauh mana kelompok usia produktif memahami isu kelanjutusiaan. Pemahaman terhadap isu kelanjutusiaan tidak hanya menyangkut isu finansial yang berkaitan dengan pensiun, pekerjaan, maupun kekayaan, namun juga mengenai kehidupan lansia, relasi social, hingga perawatan lansia. Studi ini melihat persepsi kelompok usia produktif terhadap kondisi kehidupan lansia sebagai berikut:

a. Persepsi mengenai kehidupan lansia secara umum

Persepsi atas kehidupan lansia secara umum di Indonesia ditunjukkan oleh jawaban dari para responden. Sebanyak 62 persen responden menyatakan lansia di Indonesia memiliki kehidupan yang baik dan 38 persen responden menyatakan bahwa lansia di Indonesia hidup dalam kondisi kehidupan yang buruk.

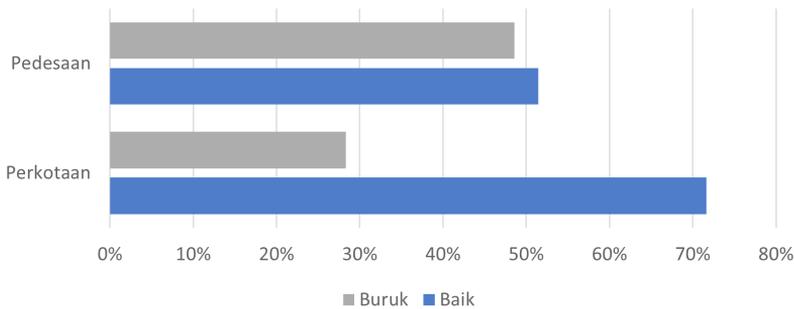
Grafik 11 Persepsi terhadap kehidupan lansia secara umum di Indonesia



Sumber: olahan hasil survei

Berdasarkan pembagian secara geografis, lansia di perkotaan dinilai memiliki kehidupan yang lebih baik daripada di pedesaan. Sebanyak 72% responden di perkotaan menilai lansia memiliki kondisi kehidupan yang baik, sedangkan di pedesaan terdapat 52% responden menyatakan hal serupa. Lalu sebanyak 49% responden yang tinggal di pedesaan menyatakan lansia memiliki kondisi kehidupan yang buruk, sedangkan hanya sebanyak 28% responden di kota menyatakan hal yang sama.

Grafik 12 Kehidupan lansia secara umum di Indonesia

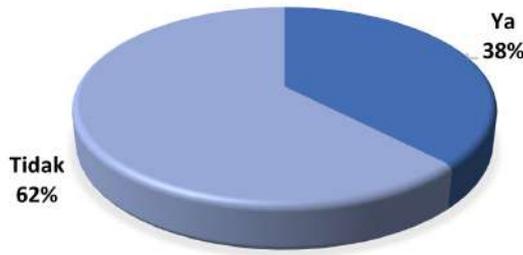


Sumber: olahan hasil survei

b. Relasi sosial dengan lansia

Terkait interaksi kelompok usia produktif dengan kelompok lansia, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden atau sebanyak 87 persen usia produktif melakukan interaksi dengan kelompok lansia. Interaksi ini terjadi dalam bentuk berbincang, jalan-jalan, atau beraktivitas bersama. Namun, dari 87 persen responden yang berinteraksi, hanya 38 persen yang mengaku berteman dengan kelompok lansia. Alasan berteman antara lain karna lansia memberikan motivasi dan mudah diajak berteman. Adapun 62 persen responden yang mengaku tidak berteman dengan lansia beralasan bahwa lansia mudah marah, konservatif, sulit dibuat senang, penuntut, dan sebagainya. Definisi hubungan pertemanan dengan lansia yang kami gunakan pada penelitian ini adalah: 1) berusia 60 tahun atau lebih; 2) bukan keluarga/kerabat; 3) bukan guru/dosen; dan 4) mengobrol dengan responden atas kehendak responden itu sendiri di lingkungannya.

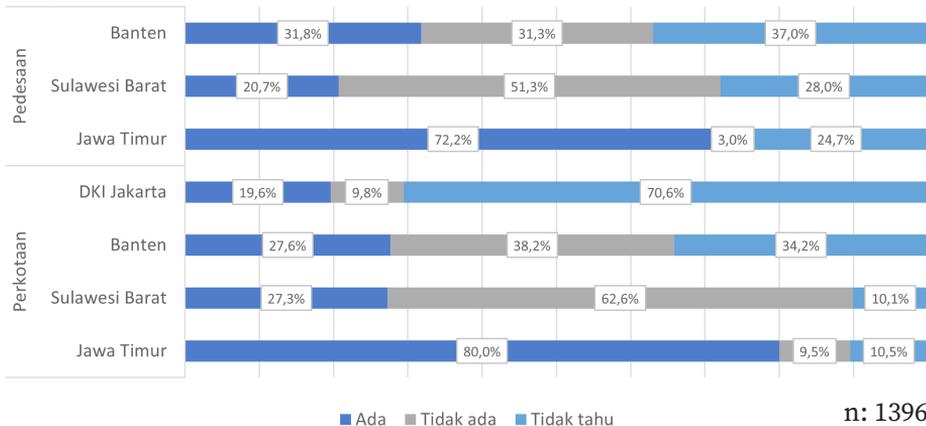
Grafik 13 Mempunyai teman lansia



Sumber: olahan hasil survei

Untuk memperdalam analisis mengenai relasi sosial kelompok usia produktif dengan kelompok lansia, kami menanyakan kepada responden mengenai ketersediaan kegiatan untuk lansia. Keinginan kelompok usia produktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan lansia dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi mereka pada masa mendatang. Kegiatan masyarakat dalam penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat pada suatu lingkungan, antara lain pengajian, arisan, pelatihan keterampilan, senam lansia, pemeriksaan kesehatan, dan lain-lain. Berdasarkan hasil survei, hanya sebanyak 39 persen menyatakan bahwa mereka memiliki kegiatan khusus lansia di lingkungan tempat tinggalnya, sebanyak 29 persen menyatakan tidak memiliki kegiatan khusus lansia di lingkungan tempat tinggalnya, dan 32 persen menyatakan tidak tahu.

Grafik 14 Kegiatan khusus lansia di tempat tinggal responden menurut jenis wilayah dan provinsi

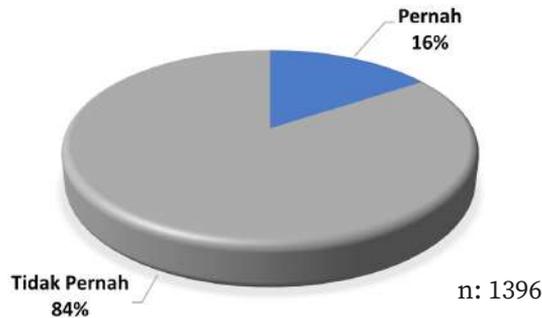


Sumber: olahan hasil survei

Ketersediaan kegiatan khusus lansia tentunya berbeda antardaerah. Disagregasi ketersediaan kegiatan khusus lansia menurut jenis wilayah dan provinsi memberikan gambaran perbedaan relasi sosial lansia antardaerah. Sebagian besar responden yang tinggal di Jawa Timur menyatakan bahwa terdapat kegiatan khusus lansia di lingkungan

tempat tinggalnya (80 persen di perkotaan dan 72 persen di perdesaan), sedangkan hanya sebagian kecil responden yang tinggal di tiga provinsi lainnya menyatakan bahwa ada kegiatan khusus lansia di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian kami juga menanyakan keterlibatan responden dalam kegiatan khusus lansia tersebut. Berdasarkan hasil survei, hanya 16 persen responden menyatakan pernah terlibat dalam kegiatan khusus lansia di tempat tinggalnya.

Grafik 15 Keterlibatan usia produktif dalam kegiatan khusus lansia

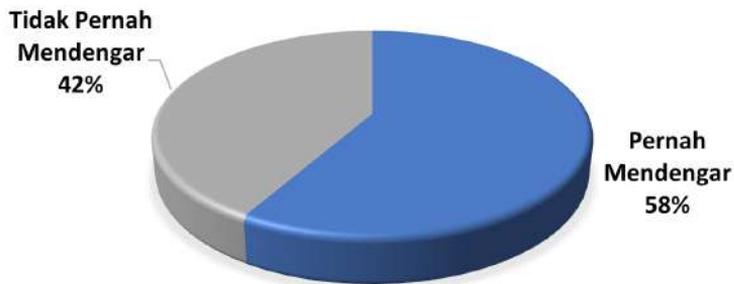


Sumber: olahan hasil survei

c. Pengetahuan mengenai program perlindungan sosial untuk lansia

Terdapat berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan oleh pemerintah, namun cakupannya masih terbatas baik dari jumlah penerima manfaat maupun jumlah manfaat yang diterima. Perlindungan sosial yang dimaksud mencakup bantuan sosial dan jaminan sosial.

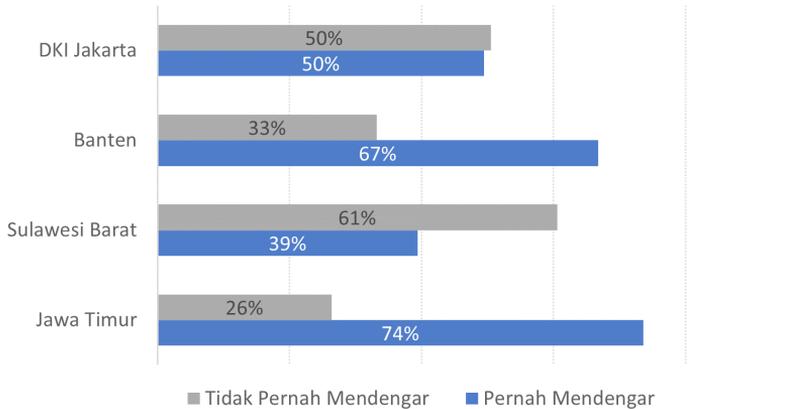
Grafik 16 Pengetahuan responden mengenai program perlindungan sosial lansia



Sumber: olahan hasil survei

Hanya sebesar 58 persen kelompok usia produktif yang pernah mengetahui dan sebanyak 42 persen usia produktif tidak pernah mendengar mengenai program perlindungan sosial bagi lansia. Pengetahuan masyarakat mengenai program perlindungan sosial lansia berdasarkan provinsi menunjukkan hasil sebagai berikut:

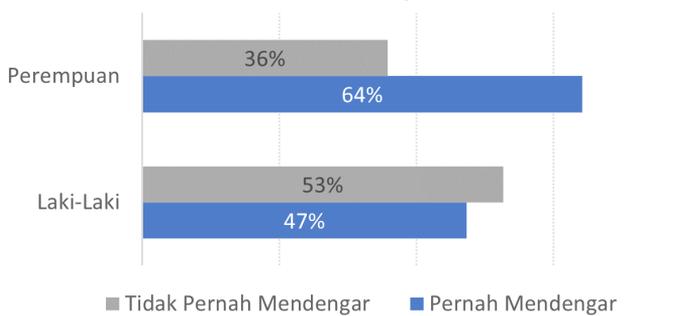
Grafik 17 Pengetahuan responden mengenai program perlindungan sosial lansia menurut provinsi



Sumber: olahan hasil survei

Responden dari Sulawesi Barat dan DKI Jakarta lebih banyak yang tidak pernah mendengar ada program khusus lansia. Pengetahuan responden perempuan terkait adanya program perlindungan sosial lansia lebih tinggi daripada responden laki-laki, yakni sebanyak 64 persen perempuan pernah mendengar program perlindungan sosial lansia dan 47 persen pada responden laki-laki.

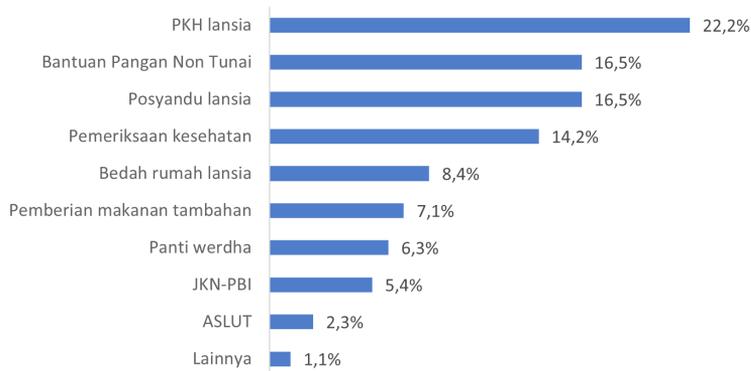
Grafik 18 Pengetahuan responden mengenai program perlindungan sosial lansia menurut jenis kelamin



Sumber: olahan hasil survei

Dari ragam program perlindungan sosial yang ada di Indonesia, responden yang mengetahui program PKH Lansia yaitu sebanyak 22 persen. Kemudian program bantuan pangan non-tunai dan Posyandu Lansia diketahui oleh masing-masing 16 persen responden. Program lainnya, seperti bedah rumah, pemberian makanan, layanan Panti werdha, JKN PBI, ASLUT (asistensi sosial lanjutan usia terlantar), dan yang lainnya berada masing-masing di bawah 10 persen dari total responden yang mengetahui adanya program perlindungan sosial lansia.

Grafik 19 Program perlindungan sosial lansia yang diketahui



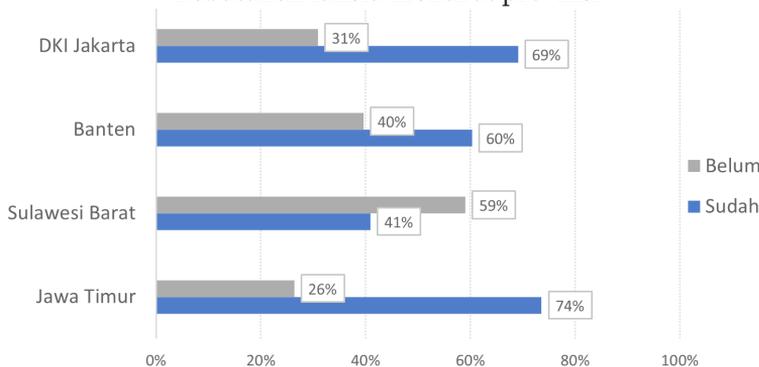
Sumber: olahan hasil survei

Program perlindungan sosial bertujuan untuk mencegah risiko yang dialami penduduk, seperti mengurangi kerentanan; meningkatkan kemampuan kelompok miskin yang rentan untuk keluar dari kemiskinan dan kesenjangan ekonomi; memungkinkan kelompok miskin untuk berhenti mewariskan kemiskinan dari satu generasi ke generasi yang lain. Penduduk lansia yang ada saat ini mayoritas tidak terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan data BPS (2019) hanya sebesar 12,91 persen rumah tangga lansia telah memiliki jaminan sosial.

d. Pelayanan kesehatan untuk lansia

Terdapat ketimpangan kualitas layanan kesehatan antar provinsi yang menjadi area survei. Terdapat 95% dan 74% responden di DKI Jakarta dan Jawa Timur menilai kualitas layanan sudah baik. Di Banten dan Sulawesi Barat hanya 60% dan 41% responden yang menyatakan layanan kualitas sudah baik. Selain itu, terdapat perbedaan persepsi antara responden yang tinggal di perkotaan dan perdesaan tentang pelayanan kesehatan yang mengakomodir kebutuhan lansia.

Grafik 20 Persepsi mengenai pelayanan kesehatan yang mengakomodir kebutuhan lansia menurut provinsi



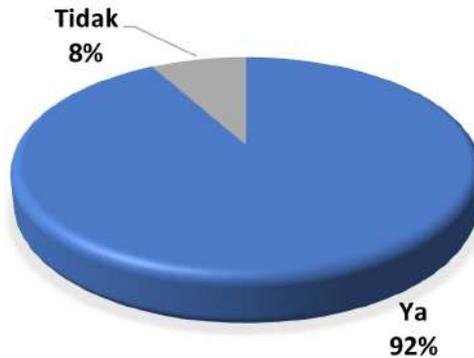
Sumber: olahan hasil survei

Survei ini melihat kondisi pelayanan kesehatan khusus bagi lansia. Baru sekitar 60 persen responden yang merasa pelayanan kesehatan sudah mengakomodir kebutuhan lansia, seperti petugas kesehatan yang ramah, terdapat perlakuan khusus untuk lansia ketika mengakses fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Terdapat 40 persen responden menyatakan bahwa pelayanan kesehatan belum mengakomodir kebutuhan lansia karena sarana dan prasarana belum memadai, fasilitas kesehatan yang terlalu jauh sehingga menyulitkan Lansia untuk mengakses, sering kehabisan obat, dan lain-lain.

e. Pengetahuan mengenai demensia atau alzheimer

Terkait dengan pengetahuan mengenai alzheimer dan demensia pada kelompok usia produktif, survei menunjukkan bahwa sebanyak 92 persen responden menyatakan bahwa pikun merupakan bagian normal dari proses penuaan.

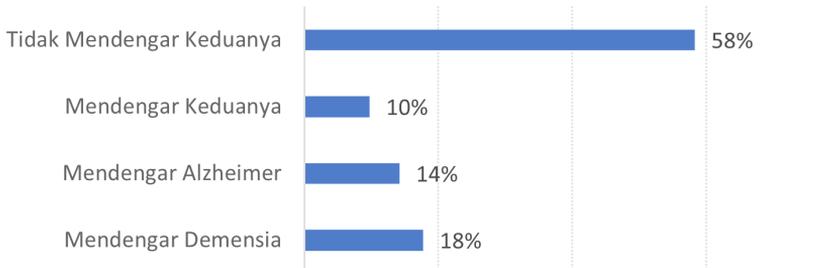
Grafik 21 Pengetahuan masyarakat bahwa pikun merupakan bagian normal dari penuaan



Sumber: olahan hasil survei

Responden juga ditanyakan pengetahuannya mengenai demensia dan alzheimer. Sebanyak 58 persen responden menyatakan tidak tahu tentang kedua hal tersebut. Hanya 10 persen responden yang menyatakan pernah mendengar kedua hal tersebut. Sisanya menyatakan hanya tahu salah satu diantara keduanya.

Grafik 22 Pengetahuan responden mengenai demensia dan alzheimer



Sumber: olahan hasil survei

Meskipun tidak selalu orang yang pikun sedang mengalami demensia, namun pikun adalah salah satu gejala terjadinya demensia. Dilihat dari pengertiannya, demensia berbeda dengan alzheimer. Demensia adalah sekumpulan sindrom, sementara alzheimer adalah jenis penyakit. Kondisi pemicu seseorang mengidap sindrom demensia bisa beragam, salah satu yang paling umum adalah alzheimer. Berikut adalah pengetahuan responden mengenai gejala dari demensia dan alzheimer.

Grafik 23 Pengetahuan responden pada gejala demensia dan alzheimer



Sumber: olahan hasil survei

Gangguan daya ingat merupakan gejala demensia yang paling diketahui oleh masyarakat. Secara umum masyarakat tidak mengetahui gejala lain dari demensia. Tidak semua penduduk lansia yang menderita alzheimer dan/atau demensia memperlihatkan perubahan perilaku pada awal gejala penyakit. Beberapa gejala terjadinya demensia menurut WHO, antara lain: 1) lupa rangkaian kejadian atau informasi, 2) terus mengulangi komentar atau pertanyaan dalam waktu berdekatan dan lupa di mana meletakkan barang yang sehari-hari digunakan, 3) tidak mengetahui tanggal dan waktu, 4) sulit mengucapkan apa yang ada di pikiran, 5) *mood* mudah berubah. Bahkan jika demensia semakin memburuk, gejalanya bisa bertambah tergantung pada bagian otak mana yang mengalami masalah (WHO, Dementia, 2019).

Kurangnya pemahaman tentang alzheimer dan demensia mengakibatkan stigmatisasi dan hambatan untuk diagnosis awal dan perawatan khusus untuk kelompok lansia dengan demensia. Menurut Fact Sheet yang disusun WHO, di seluruh dunia terdapat sekitar 50 juta orang dengan demensia. Setiap tahun ada 10 juta kasus baru di seluruh dunia (WHO, Dementia, 2019). Dan jumlah orang dengan demensia diproyeksikan akan mencapai 82 juta orang pada tahun 2030 dan 152 juta orang di 2050. Peningkatan jumlah ini disebabkan karena meningkatnya jumlah orang dengan demensia dan 60 persen tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Umumnya pengetahuan masyarakat di negara-negara tersebut mengenai kesehatan mental yang dialami oleh kelompok lansia masih minim.

Demensia berdampak tidak hanya untuk orang yang menderitanya, tetapi juga untuk *caregiver* dan keluarga lansia tersebut. WHO menyatakan penyakit ini juga dapat berdampak pada *caregiver*, keluarga, dan masyarakat dapat berupa fisik, psikologis, social, dan ekonomi (WHO, Dementia, 2019). Penelitian Solihin juga menunjukkan bahwa merawat kelompok lansia dengan kondisi alzheimer dapat menimbulkan konflik dalam sebuah keluarga, namun adanya nilai-nilai keluarga di Indonesia yang cenderung menghindari konflik juga dapat menyebabkan anggota keluarga menjadi stres (Solihin, 2016). Ada juga kasus keluarga yang mengasingkan atau memasung orang dengan demensia.

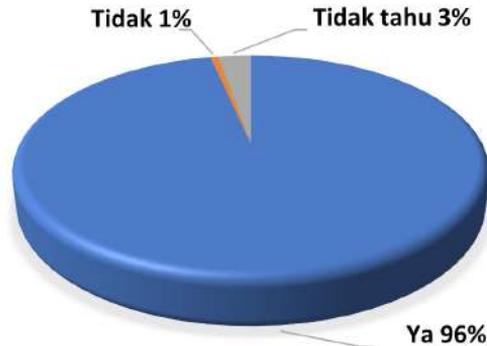
Merawat seorang lansia dalam kondisi alzheimer membutuhkan ilmu dan keterampilan khusus, terutama dalam menghadapi perubahan perilakunya. Akan tetapi, karena kurangnya pengetahuan mengenai alzheimer dan demensia menyebabkan keluarga pada umumnya tidak melakukan perawatan secara khusus. Perawatan yang dilakukan selama ini hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar kelompok lansia, seperti makan, minum, dan mandi. Namun dari segi perilaku, keluarga tidak mengetahuinya dan menganggap bahwa gejala-gejala awal alzheimer dan demensia merupakan hal yang dianggap wajar terjadi pada kelompok lansia.

f. Peran perawatan lansia

Meningkatnya usia harapan hidup mengakibatkan jumlah penduduk usia lansia semakin bertambah. Seorang lansia memiliki kebutuhan khusus, seperti kesehatan, sosial, dan mental sehingga dapat melakukan tugas sehari-hari lagi dan memengaruhi kualitas hidupnya. Masalah kesehatan yang dihadapi lansia tentu lebih kompleks sehingga membutuhkan perhatian khusus. Lansia juga cenderung ingin dirawat oleh keluarganya, meskipun perubahan struktur keluarga dan urbanisasi menyebabkan perubahan atas persepsi perawatan lansia di masyarakat. Namun, budaya Indonesia berpandangan bahwa perawatan lansia idealnya dilakukan di rumah bersama keluarga sehingga mengakibatkan peran perawatan masih menjadi tanggung jawab keluarga. Menurut ketentuan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat kewajiban timbal balik antara anak dan orang tua dan sebaliknya yang disebut dengan alimentasi.

Terkait persepsi usia produktif atas tanggung jawab dalam merawat dan memenuhi kesejahteraan lansia, sebanyak 97 persen responden menjawab merasa memiliki kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Grafik 24 Usia produktif merasa bertanggung jawab untuk merawat dan memenuhi kesejahteraan lansia



Sumber: olahan hasil survei

Sebanyak 96 persen responden menjawab bahwa mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk merawat dan memenuhi kesejahteraan lansia, terutama jika lansia merupakan anggota keluarganya. Peran perawatan lansia dalam keluarga umumnya meliputi menjaga, merawat, serta mengawasi kesehatan. Keluarga sebagai *caregiver* diharapkan mampu merawat lansia dan memenuhi kebutuhannya baik fisik maupun psikologis. Dari persentase yang menjawab ya, sebanyak 65 persen responden perempuan dan 35 persen responden laki-laki. Ini menunjukkan konstruksi peran gender memengaruhi persepsi responden dalam tanggung jawab merawat dan memenuhi kesejahteraan lansia. Persepsi responden mengenai peran anggota keluarga dalam merawat lansia menunjukkan anggota keluarga perempuan memiliki peran yang lebih besar dibanding dengan laki-laki, seperti pada anak perempuan, menantu perempuan, dan cucu perempuan.

Tugas perawatan lansia menimbulkan beban tersendiri untuk anggota keluarga yang merawatnya. Penelitian Maryam menunjukkan bahwa keluarga mengalami beban tinggi dalam merawat lansia dilihat dari multidimensi, yakni fisik, psikologis, sosial, dan finansial (Maryam, Rosidawati, Riasmini, & Suryati, 2012). Hal ini berarti anggota keluarga yang melakukan tugas perawatan lansia memiliki beban yang lebih tinggi dibandingkan anggota keluarga yang tidak melakukan tugas perawatan lansia. Peran perawatan lansia yang lebih banyak dilakukan oleh perempuan usia produktif juga berpengaruh terhadap kesempatan perempuan untuk masuk dalam pasar kerja. Berdasarkan data (BPS, 2020) terdapat lebih dari 35 juta perempuan yang tidak masuk dalam angkatan kerja yang dalam kategori BPS disebut sebagai bukan angkatan kerja atau lebih spesifik dikelompokkan dalam mengurus rumah tangga.

Peran mengurus rumah tangga merupakan peran untuk merawat keluarga dan komunitas, seperti mengasuh anak, merawat lansia, orang sakit, dan orang difabel, mulai dari menyediakan makanan untuk keluarga, mencuci baju, membersihkan rumah, dan pekerjaan lainnya (ILO, Edisi khusus Pekerjaan Layak bagi Pekerja

Rumah Tangga , 2018). Peran ini menuntut perempuan untuk mencurahkan waktu, pikiran, dan energi yang besar sehingga membatasi peran ekonomi sosial perempuan termasuk pada pasar kerja yang menyebabkan tingkat ketimpangan gender yang tinggi. Kaitannya dengan kelompok lansia, data dari TNP2K menggambarkan 70 persen dari lansia bergantung dan hidup bersama keluarga atau anaknya untuk mempertahankan kehidupannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan adalah peran utama dalam perawatan lansia.

Keinginan untuk membantu perekonomian keluarga terkadang menemui jalan buntu. Selain kewajiban menopang perekonomian orang tuanya, anak/menantu perempuan biasanya juga memiliki peran yang krusial dalam merawat orang tua saat masa lansia, terlebih jika mengalami *bed-ridden*. Lebih luas, hampir 70 persen hingga 80 persen lansia disabilitas di seluruh dunia dirawat di rumah oleh anggota keluarga mereka. Perkiraan yang bervariasi di berbagai negara menunjukkan bahwa 57 persen hingga 81 persen pengasuh lansia dalam keluarga adalah perempuan (Annisa, Muladefi, Niko, Linda, & Endah, 2019). Penting untuk diperhatikan, perempuan tanpa dukungan sosial yang memadai dan hanya beraktivitas dalam wilayah domestik tanpa memiliki kemandirian finansial maka kelompok usia produktif perempuan pada akhirnya akan menjadi kelompok lansia yang sepenuhnya bergantung pada keluarga. Selain itu, untuk perempuan yang sebelumnya bekerja dan harus berhenti bekerja dalam kurun waktu tertentu dikarenakan melakukan pekerjaan mengurus rumah tangga juga memiliki kesempatan yang lebih rendah untuk kembali ke dunia kerja.

g. Panti werdha

Keberadaan panti werdha merupakan wujud dukungan opsional pada lansia yang dapat disediakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Fungsi panti werdha tentunya sebagai opsi bagi lansia yang selain tidak memiliki sanak saudara juga bagi lansia yang secara sukarela tidak ingin tinggal bersama anak-cucu atau dengan keluarga lainnya. Persepsi-persepsi terhadap lansia yang tinggal di panti werdha dikumpulkan dalam penelitian ini untuk melihat respons warga usia produktif, sebagai berikut:

Grafik 25 Persepsi tinggal di panti werdha



Sumber: olahan hasil survei

Hasil olah data di atas menunjukkan bahwa 83 persen responden menjawab tidak setuju lansia tinggal di panti werdha. Alasan responden tidak menyetujui lansia tinggal di panti werdha karena keluarga dinilai bisa lebih menjamin. Responden yang setuju lansia tinggal di panti werdha beralasan bahwa panti werdha dapat memberikan jaminan merawat lansia serta lebih sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hanya 17 persen kehidupan dan perawatan yang lebih baik dan dapat melindungi lansia yang terlantar. Data persepsi ini menunjukkan bahwa generasi muda saat memasuki masa lansia akan masih menggantungkan dukungan informal dari keluarga (informal filial) terutama dari anak-cucu.

Terkait dengan pengetahuan kualitas panti werdha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah atau swasta, mayoritas responden atau sebanyak 96 persen menyatakan tidak tahu bagaimana kualitasnya. Ketidaktahuan ini dapat disebabkan oleh ketiadaan fasilitas panti werdha di area survei seperti di Polewali Mandar Sulawesi Barat.

h. Kekerasan terhadap lansia

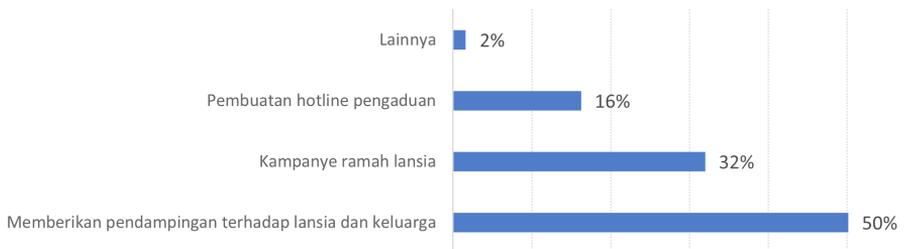
Kekerasan terhadap kelompok lansia juga menjadi perhatian dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena perlindungan bagi kelompok lansia masih belum memadai, terutama bagi lansia yang mengalami kekerasan. Terkait dengan kekerasan yang dihadapi oleh lansia, 56 persen masyarakat menyatakan tidak mengetahui adanya praktik kekerasan terhadap lansia dan 44 persen menyatakan mengetahui adanya praktik kekerasan. Selanjutnya, responden yang pernah menyaksikan atau mendengar peristiwa kekerasan terhadap lansia secara langsung hanya 5 persen dan 95 persen responden menyatakan tidak pernah. Responden yang pernah menyaksikan atau mendengar secara langsung kekerasan yang terjadi pada lansia menyatakan peristiwa tersebut 50% terjadi di rumah tetangga, komunitas 23%, di rumah keluarga 14%, di tempat publik 11%, dan di rumah sendiri sebanyak 2%. Berdasarkan penelusuran data literature, sangat sulit menemukan data-data terkait tindak kekerasan yang dialami oleh lansia tidak seperti data kekerasan pada anak dan perempuan.

Mengutip dari penelitian Putra yang menunjukan data milik WHO bahwa 1 dari 6 lansia di dunia mengalami berbagai bentuk kekerasan (Putra, 2019). Lebih lanjut, data BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa 21,6 juta orang lansia berpotensi mengalami kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, seksual, verbal, hingga kekerasan ekonomi yang akan bertambah setiap tahunnya seiring dengan penambahan jumlah penduduk lansia. Membandingkan data ini dengan angka kekerasan yang di rilis oleh WHO, diasumsikan ada 4 juta orang lansia di Indonesia yang sedang atau pernah mengalami kekerasan. Dilihat dari jenisnya, setiap responden diminta untuk memilih bentuk kekerasan yang pernah dilihatnya.

Grafik 26 Bentuk kekerasan terhadap lansia

Sumber: olahan hasil survei

Kekerasan verbal merupakan bentuk kekerasan yang paling sering ditemui yakni sebanyak 60 persen. Sebesar 16 persen lansia tidak diberikan hak dasar, seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan obat. Sisanya sebanyak 24 persen mendapatkan kekerasan dalam bentuk fisik, tidak diberikan haknya (bantuan), dan dikurung. Tidak banyak yang bisa dilakukan ketika melihat peristiwa tersebut. Hal ini karena peristiwa tersebut dianggap ranah domestik rumah tangga. Cara yang diusulkan responden dapat dilakukan untuk menanggulangi kekerasan terhadap lansia, antara lain:

Grafik 27 Cara menanggulangi kekerasan terhadap lansia

Sumber: olahan hasil survei

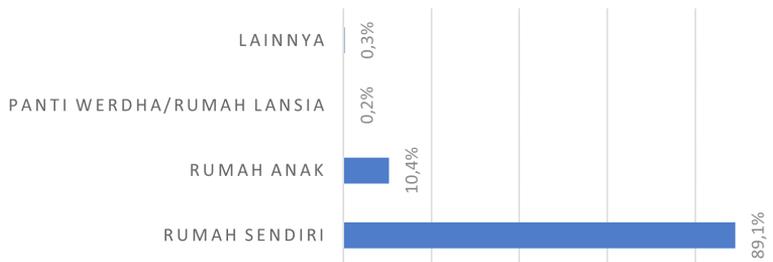
Sebesar 50 persen responden berpendapat bahwa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kekerasan pada lansia yakni dengan memberikan pendampingan terhadap lansia dan keluarganya. WHO mencatat dari rata-rata 100 kejadian kekerasan terhadap lansia di seluruh dunia, hanya 4 persen saja yang dilaporkan ke pihak yang berwajib (WHO, World Health Organization, 2017). Putra menyatakan bahwa kasus kekerasan cenderung terungkap ketika ada kepedulian dari tetangga dan orang-orang di sekitar lansia, tetapi kasus tersebut tidak serta-merta dapat dilaporkan ke ranah hukum karena mempertimbangkan berbagai hal, seperti aspek kekeluargaan, rasa takut dan khawatir, kasihan kepada pelaku, serta malu akan keadaan yang dialaminya (Putra, 2019). Oleh karena itu, dukungan dan kepedulian masyarakat sekitar merupakan langkah cepat dan efektif untuk dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap lansia.

3.3 Harapan Kelompok Usia Produktif di Masa Lansia

a. Tempat tinggal ketika lansia

Pada masa lansia, seseorang cenderung memiliki keterbatasan mobilitas dan akan lebih banyak menghabiskan waktu di tempat tinggal. Tempat tinggal juga berkaitan dengan siapa lansia akan tinggal bersama. Pola bermukim ini akhirnya tidak hanya sebatas pada kondisi fisik dari suatu bangunan, namun juga menyangkut pola interaksi lansia dengan orang lain dalam bangunan tersebut. Ketika masa lansia, sebanyak 89 persen responden menyampaikan ingin tinggal di rumah sendiri dan 10 persen dari responden menyatakan ingin tinggal di rumah anak. Sisanya sebanyak 1 persen responden menyatakan ingin tinggal di panti werdha atau di tempat lainnya.

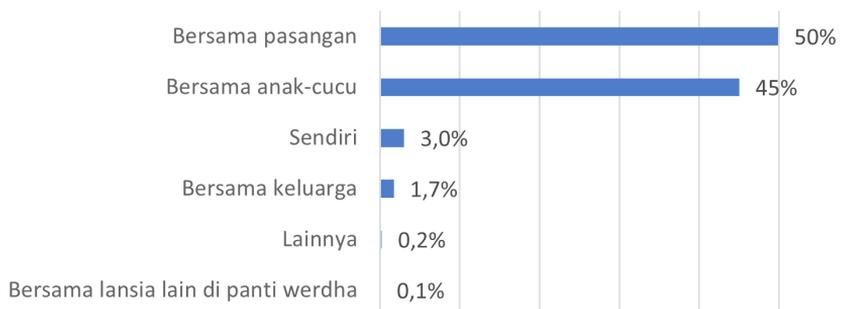
Grafik 28 Harapan tempat tinggal responden saat lansia



Sumber: olahan hasil survei

Meskipun prevalensi menjawab tinggal di rumah sendiri sangat tinggi, namun tinggal bersama orang terdekat masih mendominasi harapan anak muda ketika lansia nantinya. Sebanyak 50 persen responden ingin tinggal bersama pasangan, 45 persen responden ingin tinggal bersama anak cucu, dan 5 persen lainnya ingin hidup sendiri, bersama keluarga, bersama lansia lain di panti werdha, dan lainnya.

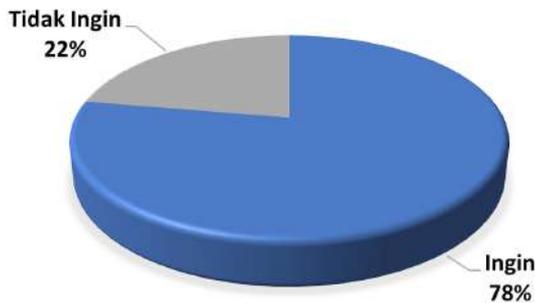
Grafik 29 Harapan tinggal bersama saat lansia



Sumber: olahan hasil survei

Grafik di atas menunjukkan skema dukungan formal seperti panti werdha sama sekali tidak diinginkan oleh generasi muda di Indonesia saat masa Lansia. Berikutnya terkait keinginan responden terhadap peran dalam keluarga, sebanyak 78 persen responden ingin memiliki peran dalam mengasuh cucu pada masa lansia. Responden yang memiliki keinginan untuk mengasuh cucu pada masa lansia terlihat lebih tinggi pada kelompok perempuan yaitu 68 persen dan pada laki-laki yang hanya 32 persen.

Grafik 30 Harapan mengasuh cucu saat lansia



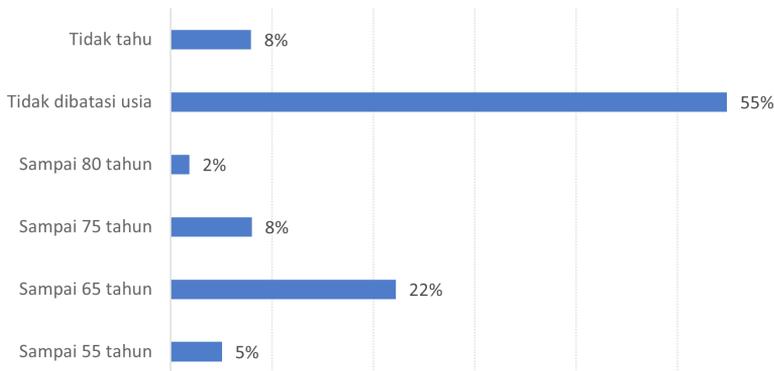
Sumber: olahan hasil survei

b. Tetap bekerja dan memiliki pendapatan

Ekspektasi responden untuk bekerja di usia lansia cukup tinggi, yakni 62 persen responden menyatakan ingin tetap produktif atau bekerja pada usia lansia dan hanya 38 persen responden yang menyatakan tidak ingin bekerja ketika memasuki usia lansia. Alasan ingin tetap bekerja di usia lansia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, membantu kehidupan keluarganya, dan untuk menyibukkan diri. Responden yang menyatakan tidak ingin bekerja memberikan alasan antara lain ingin fokus beribadah, bekerja merupakan tugas kelompok usia muda, dan karena faktor kesehatan. Keinginan untuk bekerja pada masa lansia tidak dipengaruhi oleh status bekerja atau tidak saat ini. Kecenderungan ingin bekerja di masa lansia di seluruh kelompok usia didominasi oleh responden laki-laki dibandingkan perempuan. Responden laki-laki pada kelompok usia 53-59 tahun justru menunjukkan keinginan bekerja paling besar yakni 86 persen. Persentase ini sekaligus terbesar dari seluruh kelompok usia baik laki-laki maupun perempuan. Berbeda dengan laki-laki, kelompok perempuan menunjukkan persentase yang fluktuatif.

Pemaknaan dalam hidup juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan di masa lansia. Saat seorang individu mampu mencapai kebermaknaan hidup, mereka akan merasakan hidupnya lebih berharga. Terkait persepsi mengenai kebermanfaatannya individu di dalam masyarakat, mayoritas responden atau 55 persen menyatakan bahwa kebermanfaatannya seseorang tidak dipengaruhi usia.

Grafik 31 Persepsi mengenai batasan usia yang dapat bermanfaat bagi masyarakat

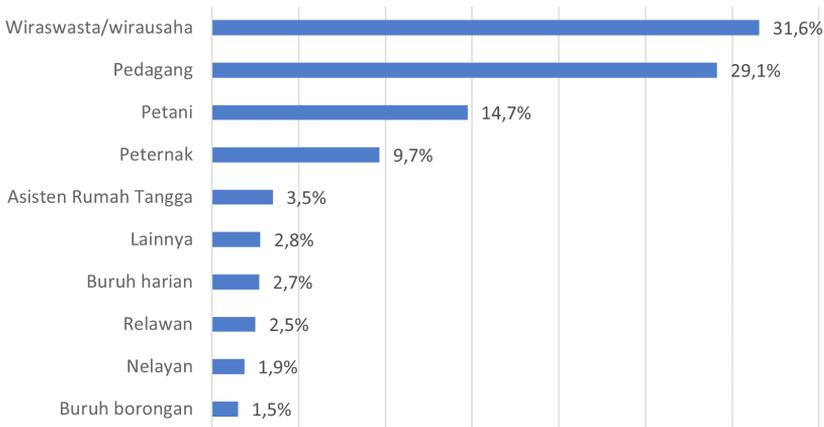


Sumber: olahan hasil survei

Terdapat 22 persen responden yang menjawab seseorang memberikan manfaat bagi masyarakat hanya sampai usia 65 tahun. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh persepsi mengenai usia pensiun dan definisi lansia. Dengan melihat persepsi mengenai batasan kebermanfaatannya seseorang dalam masyarakat, hal ini memperlihatkan optimisme seseorang dalam menjalani hidup dan menimbulkan perasaan bahagia secara subjektif.

Berdasarkan hasil survei, kelompok usia produktif melihat isu pensiun seharusnya tidak dibatasi oleh usia tertentu, melainkan berdasarkan jenis pekerjaan dan kemampuan dalam bekerja. Di Indonesia bahkan belum ada peraturan yang jelas mengenai batasan pensiun. Terdapat perbedaan pengertian batasan usia pensiun antara pekerja swasta dan pegawai pemerintahan. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak diatur kapan saatnya pensiun dan berapa Batas Usia Pensiun (BUP) untuk pekerja sektor swasta. Pada pasal 154 huruf c UU Ketenagakerjaan tidak diatur secara jelas dan tegas pada usia berapa batas usia pensiun berlaku. Bagi sektor swasta penentuan usia pensiun biasanya merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan atau berpedoman pada beberapa UU. Undang-undang No. 45 tahun 2015 pasal 15 menjelaskan bahwa per tanggal 1 Januari 2019 batasan usia pensiun yakni 57 tahun dan bertambah satu tahun setiap tiga tahun berikutnya hingga maksimal mencapai usia 65 tahun. Berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditetapkan batasan usia pensiun PNS fungsional yakni 58 tahun dan bagi pimpinan tinggi antara 60–65 tahun.

Ekspektasi profesi yang ingin dilakukan saat lansia adalah 31,6 persen dari total responden menyatakan ingin menjadi wiraswasta/wirusaha baik responden laki-laki dan perempuan. Pertanyaan ini diajukan dengan memberikan pilihan kepada responden ragam profesi dari sektor informal, pertimbangannya adalah karena secara regulasi usia lansia tidak dapat mengakses pekerjaan di sektor formal.

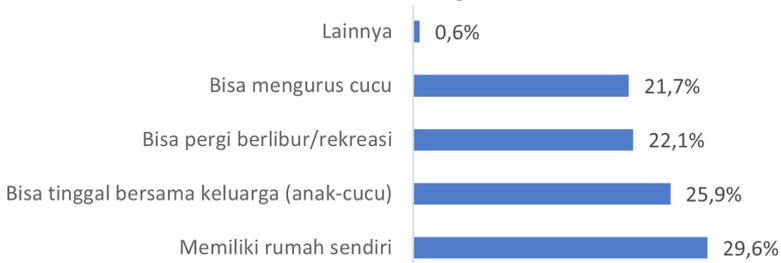
Grafik 32 Pekerjaan yang Ingin dilakukan responden saat lansia

Sumber: olahan hasil survei

Data Susenas (2018) menunjukkan bahwa lansia yang bekerja di Indonesia kebanyakan berada pada sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi pilihan lansia untuk bekerja karena tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi di sektor tersebut (BPS, Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019, 2019). Lansia yang bekerja di sektor pertanian mendapatkan upah yang lebih rendah daripada sektor lainnya. Menurut Statistik Penduduk Lanjut Usia BPS (2019), rata-rata upah yang diterima oleh lansia di sektor pertanian adalah Rp1.020.000,00 per bulan, jauh lebih rendah daripada sektor industri Rp1.689.000,00 per bulan dan sektor jasa Rp1.833.000,00 per bulan.

c. Harapan subjektif

Analisis kesejahteraan subjektif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ideal kesejahteraan yang diharapkan individu di masa lansia mendatang. Analisis ini penting untuk dilakukan agar kebijakan kesejahteraan juga mempertimbangkan sisi subjektif kebutuhan lansia. Kondisi bahagia ketika lansia adalah salah satu proksi yang digunakan dalam penelitian ini, guna memberikan gambaran tentang kesejahteraan subjektif di masa mendatang.

Grafik 33 Kondisi bahagia ketika lansia

Sumber: olahan hasil survei

Hampir 30 persen responden menyatakan kondisi bahagia ketika lansia adalah memiliki rumah sendiri, sebanyak 26 persen responden bisa tinggal bersama keluarga, sebanyak 22 persen responden berharap bisa pergi berlibur/rekreasi, dan 22 persen sisanya berharap bisa mengurus cucu dan lainnya.

3.4 Analisis Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun

Jaminan sosial ditujukan untuk memberikan perlindungan atas seluruh risiko sosial yang ada bagi setiap orang. Deklarasi Universal Hak asasi manusia Pasal 22–10 Desember 1948 menyebutkan bahwa setiap orang, sebagai anggota masyarakat, memiliki hak untuk jaminan sosial. Di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial dan secara teknis diatur dalam undang-undang nomor 40/2004 Pasal 3 bahwa sistem jaminan sosial nasional bertujuan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak.

Lansia memiliki permasalahan dan kerentanan dari sisi psikososial yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Hal ini berpengaruh dalam perencanaan skema program bagi Lansia yang perlu pemahaman secara komprehensif. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mendukung persiapan masa lansia. Jaminan tersebut bertujuan mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan lansia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis program jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

a. Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Nasional

Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjalankan program jaminan sosial Ketenagakerjaan, yakni program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKm), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP). Program jaminan hari tua dan jaminan pensiun ditujukan sebagai persiapan menjalani hari tua. Masih banyak orang yang menganggap keduanya memiliki fungsi yang sama, padahal sebenarnya masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Berikut adalah perbedaan antara JHT dan JP.

Tabel 3 Perbedaan antara jaminan hari tua dan jaminan pensiun

Perbedaan	Jaminan Hari Tua	Jaminan Pensiun
Pengertian	Program yang memberikan manfaat berupa uang tunai kepada pesertanya, yang akan dibayarkan sekaligus jika peserta sudah mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia dan/atau cacat tetap. Besarnya uang per-tanggungannya adalah akumulasi iuran yang sudah dibayarkan ditambah hasil pengembangannya.	Pensiun diberikan ketika tertanggung pensiun, meninggal atau cacat tetap namun pemberiannya tergantung kondisi, bila ternyata masih hidup diberikan secara bertahap hingga tetanggung meninggal dunia. Program memberikan manfaat, jika pekerja memasuki masa pensiun (mulai dari umur 56 tahun).

Bab 3

Hasil Temuan: Kondisi, Persepsi, dan Harapan Usia Produktif

Tujuan	Tabungan dari bagian pendapatan selama aktif bekerja yang disisihkan untuk bekal memasuki hari tua	Mengganti pendapatan bulanan dan untuk memastikan kehidupan dasar yang layak saat memasuki usia tua
Peserta	Pekerja Penerima Upah (PPU) dan BPU (Bukan Penerima Upah)	Pekerja Penerima Upah (PPU)
Besaran iuran	<p>Besaran iuran untuk PPU adalah 5,7% dari upah pokok. Premi tersebut dibayarkan patungan pemberi kerja (3,7%) dan peserta (2%). Pembayaran dilakukan oleh perusahaan, maksimal tanggal 15. Jika terlambat bayar akan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulannya.</p> <p>Besaran iuran untuk BPU adalah disesuaikan dengan besaran penghasilan masing-masing peserta. Pembayaran dilakukan sendiri melalui bank, maksimal tanggal 15. BPU yang dapat mendaftarkan dirinya sebagai peserta adalah BPU yang memiliki upah minimal 1 juta rupiah dengan iuran bulanan sebanyak 32 ribu rupiah.</p>	<p>Iuran yang harus dibayarkan adalah 3% dari upah setiap bulan. Iuran tersebut dibayarkan patungan antara pemberi kerja (2%) dan iuran pekerja (1%). Upah yang dijadikan standar adalah upah pokok dan tunjangan tetap.</p> <p>Pada tahun 2015, batasan paling tinggi upah yang digunakan adalah Rp 7 juta. Pembayaran dilakukan setiap tanggal 15 dan denda keterlambatan sebesar 2%.</p>
Pembayaran manfaat	Sekaligus/lumpsum	Bulanan
Besar manfaat	Akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan	Dihitung dengan formula tertentu berdasarkan masa iur, upah selama masa iur dan faktor manfaat (faktor akrual)
Mekanisme penyelenggaraan	Tabungan wajib	Asuransi sosial
Bentuk program	Tabungan atau provident fund	Manfaat pasti
Risiko harapan hidup yang semakin panjang	Ditanggung sendiri secara individual oleh peserta	Ditanggung Bersama secara kolektif (<i>pooling of risks</i>) oleh peserta

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2019

Pekerja Penerima Upah (PU) dapat mengakses layanan JP dan JHT, sedangkan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) hanya diperbolehkan mengakses JHT. Perbedaan mendasar antara JP dan JHT terletak pada sistem pencairannya. JHT dapat dicairkan ketika telah

memasuki masa pensiun (56 tahun), sedangkan JP diberikan setiap bulannya saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia, dengan syarat, peserta telah memenuhi masa iuran minimum 15 tahun. Dalam UU SJSN, usia batasan pensiun naik menjadi 57 tahun pada 1 Januari 2019. Usia ini akan terus bertambah satu tahun setiap rentang tiga tahun hingga mencapai batas 65 tahun. Namun, saat ini program JHT dapat diambil tanpa menunggu usia pensiun. Hal ini bertentangan dengan prinsip JHT yang merupakan persiapan masa lansia.

Berdasarkan penelitian Siregar dikatakan Jaminan Hari Tua (JHT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap manfaat yang diterima tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (Siregar, 2019). Jaminan Pensiun (JP) mempunyai pengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap manfaat yang diterima tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan pensiun tidak signifikan karena peserta BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa dengan iuran 3 persen, uang pensiun yang akan diterima belum layak untuk hari tua. Nominal iuran yang kecil akan berpengaruh terhadap manfaat pensiun yang akan diterima nantinya. Berdasarkan perhitungan, rata-rata nominal manfaat per bulan yang akan diterima oleh pekerja pada masa pensiun adalah:

Tabel 4 Skema perubahan batas upah tertinggi dan nilai manfaat pensiun yang dapat dinikmati peserta BPJS Ketenagakerjaan

Tahun	Bulan	Batas Upah	Ilustrasi iuran 3% dari upah selama 15 tahun (tanpa kenaikan)	Manfaat Pensiun per bu-lan	
				Minimum	Maksimum
2015	Januari – Juni	Rp -	Rp-	Rp -	Rp -
	Juli – Desember	Rp7.000.000	Rp37.800.000	Rp300.000	Rp3.600.000
2016	Januari dan Februari	Rp7.000.000	Rp37.800.000	Rp300.000	Rp3.600.000
	Maret - Desember	Rp7.335.300	Rp39.610.620	Rp310.050	Rp3.720.600
2017	Januari dan Februari	Rp7.335.300	Rp39.610.620	Rp310.050	Rp3.720.600
	Maret - Desember	Rp7.703.500	Rp41.598.900	Rp319.450	Rp3.833.000
2018	Januari dan Februari	Rp7.703.500	Rp41.598.900	Rp319.450	Rp3.833.000
	Maret - Desember	Rp8.094.000	Rp43.707.600	Rp331.000	Rp3.971.400
2019	Januari dan Februari	Rp8.094.000	Rp43.707.600	Rp331.000	Rp3.971.400
	Maret - Desember	Rp8.512.400	Rp45.966.960	Rp341.400	Rp4.095.750

Sumber: Rafinska, 2019, diolah

Dari tabel di atas kita dapat melihat, jika peserta menerima manfaat minimum per bulan sebesar Rp341.400,00 per bulan dari upah Rp8.512.400,00. Nilai tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk standar hidup layak, apalagi pada tahun 2029 mendatang.

Program pensiun yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan menggunakan sistem pendanaan *fully funded*, yakni iuran pensiun bersumber dari kontribusi iuran yang dibayarkan oleh pekerja dan pemberi kerja (sektor formal). Manfaat pensiun ini akan dibayarkan kepada peserta dengan kondisi sebagai berikut: 1) *Pensiun hari tua*, diterima setelah pensiun sampai meninggal dunia; 2) *Pensiun cacat*, diterima peserta cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai dengan meninggal dunia; 3) *Pensiun janda/duda*, diterima janda/duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi; 4) *Pensiun anak*, diterima anak ahli waris peserta sampai usia 23 tahun, bekerta atau menikah; dan 5) *Pensiun orang tua*, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu.

Jika dikaitkan dengan perubahan demografi yang menuju *ageing population*, program ini dikhawatirkan akan mengalami kekurangan pendanaan. Seperti pernyataan salah seorang staf BPJS Ketenagakerjaan pengelola program berikut:

Harusnya iuran itu, prosentasenya naik setiap 2 tahun sekali dan disesuaikan. Jumlah premi iuran harus segera diperbaiki, kalau tidak maka akan defisit. Kita hanya menyimpan bom waktu yang suatu saat, ooh ini yang defisit BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), padahal bukan, sebenarnya kalau ini segera diantisipasi kita nggak bakal seperti BPJS Kesehatan.

Ad, Deputy Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan, 2019



Jika merujuk pada PP No. 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun, disebutkan dalam pasal 28 ayat 4 dan 5. Besaran Iuran dilakukan evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuarial. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran Iuran secara bertahap menuju 8% (delapan persen).

Kenaikan iuran perlu dilakukan secara berkala karena dinilai lebih efektif dibandingkan kenaikan yang dilakukan secara tiba-tiba dengan nominal yang tinggi. Hal ini untuk mengurangi risiko berkurangnya minat masyarakat untuk menjadi peserta JHT dan JP mengingat ini belum bersifat wajib. Selain itu, pemerintah dapat membuat roadmap kenaikan iuran secara berkala hingga mencapai angka maksimal dan memastikan sumber-sumber pendanaan yang berkelanjutan.

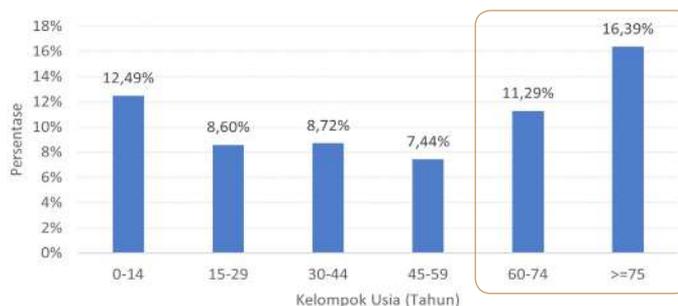
b. Pentingnya Jaminan Pensiun Sosial

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, Indonesia tengah mengalami fenomena transisi demografi yang teridentifikasi dari data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015. Pada tahun 2020 hingga 2030, penduduk usia 15–59 tahun mengalami peningkatan sebesar 10 juta penduduk dari 175 juta orang menjadi 185 juta orang. Besarnya jumlah usia produktif ini sering disebut sebagai bonus demografi. Bonus demografi tidak akan memberikan dampak signifikan jika negara minim investasi sumber daya manusia. Investasi sumber daya manusia yang modern, antara lain: 1) meningkatkan SDM yang berkualitas, 2) membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya, 3) meningkatkan partisipasi bekerja pada perempuan, dan 4) adanya tabungan masyarakat yang diinvestasikan secara produktif.

Proyeksi SUPAS 2015 ini juga menunjukkan bahwa tahun 2030 hingga 2035 jumlah penduduk usia produktif akan terus menurun. Akan timbul ledakan penduduk lansia setelah bonus demografi. Adapun risiko yang akan dihadapi oleh suatu negara apabila tidak mempersiapkan program perlindungan sosial pascasetelah bonus demografi adalah pembengkakan jaminan sosial dan pensiun. Tentu ini juga berpengaruh pada stagnasi perekonomian nasional sebab tabungan dari usia produktif dialihkan sebagai dana talangan kedua hal tersebut.

Lebih lanjut, kelompok lansia di Indonesia memiliki persentase kemiskinan yang lebih tinggi daripada kelompok usia lainnya. Grafik di bawah ini menunjukkan persentase kemiskinan menurut usia di Indonesia, hasilnya adalah 11,29 persen penduduk usia 60–74 tahun miskin dan 16,39 persen penduduk usia 75 tahun ke atas miskin dari total masing-masing kelompok usia 100 persen. Angka ini melebihi persentase kemiskinan Indonesia yaitu 9,82 persen.

Grafik 34 Persentase kemiskinan menurut usia



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, diolah.
Ket.: Penentuan miskin berdasarkan garis kemiskinan Kabupaten/Kota

Generasi muda di Indonesia memiliki berbagai tantangan dalam menyiapkan masa lansia, seperti pendapatan yang rendah, besarnya proporsi pekerja sektor informal yang tidak terlindungi JHT/JP, serta tantangan menjadi generasi *sandwich*. Kondisi ini berisiko membuat kelompok usia produktif rentan menjadi miskin pada saat memasuki

masa lansia. Dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2004 Pasal 3 disebutkan bahwa SJSN bertujuan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak dan setiap orang berhak atas jaminan sosial. Program jaminan hari tua dan jaminan pensiun di Indonesia sudah dijalankan sejak tahun 2014. Namun, jaminan pensiun belum diperuntukan bagi pekerja informal.

Pekerja yang berpendapatan rendah umumnya tidak memiliki JHT atau JP seperti pada temuan hasil survei di atas. Melihat struktur pasar kerja dan risiko *aging population* mendatang, pemerintah perlu segera merencanakan sebuah sistem yang dapat mendukung seluruh pekerja berpendapatan rendah memiliki jaminan pensiun. Menurut ILO, kunci untuk meminimalisasi kondisi miskin pada masa lansia adalah kontribusi pensiun yang memadai dan keterjangkauan skema pensiun oleh seluruh segmen masyarakat (ILO, World Social Protection Report 2014/2015: Building Economic Recovery, Inclusive Development and Social Justice, 2014).

Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mencakup lansia yang belum pernah mempersiapkan tabungan hari tua (informal dan miskin) adalah melalui pensiun sosial (Yulaswati, 2015). Pensiun sosial diberikan melalui pemberian bantuan iuran kepada masyarakat yang tidak mampu membeli jaminan sosial. Pemberian pensiun sosial merupakan satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk memastikan konsumsi dan memberikan kepastian pendapatan, terutama memasuki masa lansia. Pensiun sosial harus memperhatikan penanggulangan kemiskinan, kecukupan pendapatan pensiun, manfaat/keberlanjutan kontribusi, kesetaraan pendapatan, dan distribusi kekayaan (Brown, 2008).

Skema keanggotaan untuk jaminan pensiun sosial harus diperluas menjangkau seluruh kategori pekerja, terutama pekerja di sektor informal. Pembiayaan diperoleh dari skema kontribusi dan non-kontribusi, dalam skema non-kontribusi perlu ditetapkan batasan penerima manfaat subsidi iuran atau penerima bantuan iuran (PBI). Manfaat yang didapatkan minimal dapat memenuhi kebutuhan hidup di atas garis kemiskinan nasional. Skema redistributif diperlukan agar masyarakat yang kurang beruntung bisa mendapatkan jaminan hidup minimum pada masa lansia.

Pengembangan pensiun berbasis kontribusi untuk sektor informal pada usia kerja, baik miskin maupun tidak miskin, perlu memperhatikan aspek-aspek berikut (Yulaswati, 2015): 1) Perlu peningkatan pemahaman pentingnya jaminan pensiun dan perlindungan hari tua; 2) Sistem kontribusi dan pengambilan manfaat harus bersifat fleksibel; 3) Terdapat kemudahan pendaftaran dan pembayaran; dan 4) Insentif/subsidi untuk beberapa golongan peserta melalui subsidi premi atau tautan dengan program lainnya dan menjadikannya wajib bagi peserta program tersebut. Misalnya, peserta KUR diwajibkan untuk menyisihkan keuntungan sebagai tabungan pensiun.



Bab 4 Penutup

Mayoritas responden atau lebih dari 90 persen responden menganggap jaminan hari tua atau pensiun itu penting. Namun, hanya 11 persen yang memiliki persiapan hari tua atau masa lansia. Sebanyak 5 persen mendapatkan JP atau JHT ini dari tempatnya bekerja di sektor formal dan hanya 6 persen pekerja informal mempersiapkannya secara mandiri dalam bentuk tabungan. Di sisi lain, tabungan berisiko digunakan apabila terjadi situasi sulit. Dari yang telah memiliki jaminan, sebagian besar tidak tahu apakah jaminan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa lansia.

Foto oleh Refhad



BAB 4

Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa kesimpulan mengenai kondisi kehidupan kelompok usia produktif, persepsi kelompok usia produktif terhadap kelompok lansia, dan harapannya di masa lansia, yaitu:

1. Kondisi kehidupan kelompok usia produktif

Kelompok usia produktif mayoritas merupakan *sandwich generation* yakni hampir 70 persen responden tinggal dalam tiga generasi. Lebih dari setengah responden tinggal di rumah milik keluarga dan mengontrak. Dilihat dari status pekerjaan, hampir 50 persen responden tidak bekerja dan mayoritas adalah perempuan. Dari 35 persen responden yang bekerja pada sektor formal dan informal, paling banyak berpendapatan di bawah Rp2.500.000,00 per bulan. Jika dilihat terpisah, sebanyak 47 persen pekerja informal terkonsentrasi pada pendapatan kurang dari Rp1.000.000,00 per bulan. Rendahnya pendapatan saat ini dapat berimplikasi pada terbatasnya akses terhadap jaminan sosial, lemahnya persiapan untuk memasuki hari tua, sehingga rentan miskin saat masa lansia. Perilaku miopia (rabun jauh terhadap risiko mendatang) menjadi tantangan generasi produktif dalam mempersiapkan masa lansia.

Mayoritas responden atau lebih dari 90 persen responden menganggap jaminan hari tua atau pensiun itu penting. Namun, hanya 11 persen yang memiliki persiapan hari tua atau masa lansia. Sebanyak 5 persen mendapatkan JP atau JHT ini dari tempatnya bekerja di sektor formal dan hanya 6 persen pekerja informal mempersiapkannya secara mandiri dalam bentuk tabungan. Di sisi lain, tabungan berisiko digunakan apabila terjadi situasi sulit. Dari yang telah memiliki jaminan, sebagian besar tidak



tahu apakah jaminan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa lansia. Responden tidak cukup memiliki komitmen untuk menyisihkan pendapatannya untuk mempersiapkan masa lansia. Lebih dari 70 persen responden menjawab tidak tahu tentang berapa nominal yang dapat disisihkan untuk mempersiapkan hari tua dan hanya sekitar 22 persen responden menyatakan sanggup membayar pada kisaran Rp200.000,00—Rp500.000,00 per bulan. Responden yang tidak memiliki persiapan hari tua atau masa lansia menyatakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada saat lansia mereka akan bergantung pada keluarga atau anak dan pemerintah.

2. Persepsi kelompok usia produktif terhadap kelompok lansia

Kelompok usia produktif melihat bahwa kehidupan lansia secara umum di Indonesia sudah baik. Lansia di perkotaan dinilai memiliki kehidupan yang lebih baik daripada di perdesaan. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 87 persen berinteraksi dengan kelompok lansia. Namun, hanya 38 persen yang mengaku berteman dengan kelompok lansia. Alasan responden yang mengaku tidak berteman dengan lansia beralasan karena lansia mudah marah, konservatif, sulit dibuat senang, penuntut, dan sebagainya.

Kelompok usia produktif yang pernah mengetahui program perlindungan sosial bagi lansia hanya sebesar 58 persen dan sebanyak 42 persen usia produktif tidak pernah mendengar mengenai program perlindungan sosial. Terdapat ketimpangan kualitas layanan kesehatan antarprovinsi yang menjadi area survei. Sebanyak 95 persen dan 74 persen responden di DKI Jakarta dan Jawa Timur menilai kualitas layanan sudah baik. Lain halnya dengan Banten dan Sulawesi Barat, hanya sekitar 60 persen dan 41 persen responden yang menyatakan layanan kualitas sudah baik. Responden juga menilai

lansia masih belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Layanan kesehatan dinilai belum mengakomodir kebutuhan lansia karena sarana dan prasarana belum memadai, fasilitas kesehatan yang jauh, kehabisan obat, dan lain-lain.

Kelompok usia produktif menyatakan pikun merupakan bagian normal dari proses penuaan yakni sebanyak 92 persen. Padahal pikun merupakan salah satu gejala terjadinya demensia. Hanya 10 persen responden yang pernah mendengar demensia dan alzheimer. Mayoritas kelompok usia produktif merasa memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk merawat lansia. Namun ketimpangan gender masih terjadi, diketahui responden masih beranggapan bahwa anggota keluarga perempuan memiliki peran yang lebih besar dalam melakukan perawatan dibandingkan anggota keluarga laki-laki. Hal ini berdampak pada semakin rendahnya kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, memiliki beban yang lebih tinggi, dan menimbulkan dampak ketika lansia akan bergantung pada keluarga.

Kelompok usia produktif tidak setuju lansia tinggal di panti werdha. Alasan responden tidak menyetujui lansia tinggal di panti werdha adalah karena keluarga dinilai bisa lebih menjamin dan merawat lansia serta lebih sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa saat kelompok usia produktif memasuki masa lansia akan mengharapkan dukungan informal dari keluarga (informal filial), terutama dari anak-cucu. Skema dukungan formal seperti panti werdha sama sekali tidak diinginkan oleh generasi muda di Indonesia saat masa lansia.

Terdapat 5 persen responden yang pernah melihat secara langsung kekerasan yang terjadi terhadap lansia. Kekerasan tersebut paling banyak terjadi di rumah tetangga dan bentuk yang paling sering ditemui adalah kekerasan verbal, tidak diberikan hak dasar seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Sayangnya tidak banyak yang bisa dilakukan ketika melihat peristiwa tersebut, hal ini karena hal tersebut dianggap ranah domestik rumah tangga.

3. Harapan kelompok usia produktif di masa lansia

Kelompok usia produktif berharap ingin tinggal di rumah sendiri, yakni sebesar 89 persen. Selain itu, tinggal bersama orang terdekat masih mendominasi harapan anak muda ketika lansia. Sebagian besar responden berharap bisa tetap bekerja saat lansia yakni 62 persen dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membantu kehidupan keluarga, dan untuk menyibukkan diri. Menjadi wiraswasta/wirausaha menjadi pilihan bagi responden baik laki-laki dan perempuan untuk seluruh jenis latar belakang pekerjaan dan pendapatan. Profesi dari sektor informal menjadi pilihan karena secara regulasi kelompok lansia tidak dapat mengakses pekerjaan di sektor formal karena dibatasi oleh usia pensiun. Hal ini berdampak pada terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya pendapatan dan tidak adanya perlindungan bagi

pekerja lansia. Kelompok usia produktif melihat isu pensiun seharusnya tidak dibatasi oleh usia tertentu, melainkan berdasarkan jenis pekerjaan dan kemampuan dalam bekerja. Selain itu, belum ada peraturan yang secara jelas mengenai batasan pensiun. Terdapat perbedaan pengertian batasan pensiun antara pekerja swasta dan pegawai pemerintahan. Kesejahteraan subjektif juga merupakan hal yang penting di masa lansia. Responden menyatakan kondisi bahagia ketika lansia adalah ketika memiliki rumah sendiri, bisa tinggal bersama keluarga, bisa pergi berlibur/rekreasi, mengurus cucu, dan lainnya.

4. Program jaminan hari tua dan jaminan pensiun

Kelompok usia produktif menganggap JHT dan JP memiliki fungsi yang sama, padahal sebenarnya masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Perbedaan mendasar antara JP dan JHT yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan terletak pada sistem pencairannya. JHT dapat dicairkan ketika telah memasuki masa pensiun (56 tahun), sedangkan JP diberikan setiap bulannya saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia, dengan syarat, peserta telah memenuhi masa iuran minimum 15 tahun. Namun, terdapat kebijakan terbaru yang dinilai kontradiktif mengatur mengenai pengambilan manfaat JHT. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2015 mengatur bahwa saldo JHT bisa diambil ketika seseorang kehilangan pekerjaan tanpa harus menunggu usia kepesertaan 10 tahun atau peserta minimal berumur 56 tahun, seperti yang tertera di peraturan sebelumnya (Peraturan Pemerintah (PP) No 46 tahun 2015). Besaran nilai manfaat JP dirasa belum dapat memenuhi kebutuhan hidup layak saat lansia, hal ini dipengaruhi oleh nominal besaran iuran yang hanya sebesar 3 persen.

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baru menjangkau sekelompok kecil masyarakat dan berdasarkan PP No. 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun ternyata belum mengakomodir pekerja dari sektor informal atau yang bekerja sendiri tanpa dibantu orang lain. Skema pembayaran iuran yang ditawarkan selama ini yakni dilakukan oleh pekerja dan pemberi kerja. Padahal, jumlah pekerja informal saat ini lebih besar dibanding pekerja formal. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan pengelola program dari BPJS Ketenagakerjaan diketahui bahwa JP yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berpotensi defisit di masa mendatang. Jika dikaitkan dengan perubahan demografi yang menuju *ageing population*, program ini dikhawatirkan akan mengalami kekurangan pendanaan apabila tidak dilakukan kenaikan secara berkala.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap temuan penelitian, ada beberapa rekomendasi kebijakan dan perbaikan teknis sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu segera melakukan perbaikan regulasi antara lain:
 - Pemerintah harus melakukan revisi UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN dalam pasal 42 tentang jaminan sosial dibayarkan oleh perusahaan dan/atau pekerja sehingga dapat menjangkau pekerja informal yang juga memiliki kerentanan.
 - Perlu segera direvisi kebijakan yang mengatur mengenai jaminan pensiun, yakni PP No. 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Kebijakan perlu mengatur JP untuk pekerja informal dan penyesuaian besaran iuran JP. Definisi kepesertaan perlu diperluas bukan hanya untuk pekerja saja, tetapi dimulai dari pelajar SMA, mahasiswa, dan bukan pekerja lain seperti perempuan yang mengurus rumah tangga. Besaran iuran untuk kelompok pekerja juga perlu disesuaikan dengan basis pendapatan mereka. Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan perlu membuat skema penarikan iuran yang lebih mudah dilakukan oleh seluruh masyarakat segala usia. Bagi kelompok yang secara nominal upah tidak bisa memiliki daya beli jaminan sosial maka pemerintah harus mempertimbangkan dan membuat skema jaminan pensiun sosial untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran).
 - Pemerintah perlu *me-review* kembali Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua terkait dengan pengambilan JHT sebelum masa pensiun. Kebijakan ini dinilai kontradiktif dengan prinsip JHT, untuk mempersiapkan jaminan hari tua, berbeda dengan jaminan kehilangan pekerjaan.
 - UU No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia perlu mengatur mengenai perlindungan hukum untuk lansia.
2. Penyesuaian nominal iuran jaminan pensiun perlu dilakukan secara periodik dan bertahap hingga mencapai batas maksimum 8 persen sesuai PP No. 45 tahun 2015 pada pasal 28. Hal ini disebabkan karena besaran iuran jaminan pensiun sebesar 3 persen dinilai belum layak untuk hari tua. Nominal iuran yang kecil akan berpengaruh terhadap manfaat pensiun yang akan diterima pekerja dan keluarganya. Penyesuaian iuran perlu dilakukan untuk memastikan tersedianya dana yang cukup untuk mencegah terjadinya potensi defisit dana jaminan sosial, khususnya jaminan pensiun yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, mengingat Indonesia akan mengalami perubahan struktur demografi penduduk di masa mendatang.

3. Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan perlu mempromosikan dan melakukan sosialisasi terus menerus mengenai pentingnya jaminan pensiun dan kontribusi atas iuran kepada masyarakat yang lebih luas. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media yang disesuaikan dengan karakteristik kelompok usia produktif yang lebih dekat dengan teknologi digital. Promosi dan sosialisasi dapat dilakukan dengan memberi informasi mengenai manfaat yang akan mereka dapatkan. Promosi dan sosialisasi harus melibatkan multipihak seperti lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, lembaga perbankan, asuransi swasta, kelompok masyarakat sipil, hingga tokoh masyarakat di tingkat desa.
4. Berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan untuk seluruh penduduk Indonesia, khususnya pada anak-anak dan remaja sebagai upaya persiapan transisi demografi. Pembelajaran seumur hidup perlu diterapkan agar dapat meningkatkan produktivitas dan memelihara pertumbuhan ekonomi dapat konsisten. Pekerjaan saat ini bergeser ke pekerjaan yang membutuhkan keterampilan kognitif dan sosial-emosional di era digital sehingga penduduk usia produktif atau generasi muda perlu menerapkan pembelajaran seumur hidup dan mampu mengikuti perkembangan teknologi dan mempertahankan keterampilan. Investasi di bidang kesehatan dapat mengurangi biaya perawatan kesehatan pada saat *aging population* di masa depan.
5. Menghilangkan diskriminasi terkait usia, termasuk hambatan usia dalam pekerjaan dan jenis pekerjaan. Hal ini dapat mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan produktivitas dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan setara untuk penduduk seluruh kelompok usia. Pekerja lansia juga harus mendapat program perlindungan sosial, memastikan akses dan peluang pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja. Hal ini merupakan upaya mempromosikan dan melindungi hak dan martabat orang tua. Kebijakan di area ini bertujuan menghilangkan hambatan usia di pasar tenaga kerja formal, promosi perekrutan dan peluang pekerjaan yang fleksibel bagi pekerja lansia, serta memfasilitasi akses ke kredit mikro dan menyediakan insentif lainnya untuk wirausaha lansia.
6. Mempromosikan kesehatan dan pencegahan penyakit sepanjang hayat untuk mempertahankan kapasitas fungsional seseorang termasuk kesehatan mental. Seiring bertambahnya populasi lansia, penting memastikan tersedianya akses untuk pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi penyakit untuk seluruh orang di semua tahap kehidupan. Penuaan yang sehat lebih dari sekedar tidak adanya penyakit, tetapi juga memerlukan pemeliharaan kemampuan fungsional sepanjang hidup. Kesehatan dan sistem perawatan jangka panjang perlu diselaraskan untuk memenuhi kebutuhan populasi lansia dengan menyediakan perawatan yang terintegrasi sesuai dengan usia dan berfokus pada menjaga kapasitas intrinsik lansia.

7. Pemerintah perlu memastikan panti werdha atau rumah perawatan lansia dibangun dan dijalankan sesuai dengan standardisasinya. Kualitas pelayanan yang baik yang diberikan oleh panti werdha akan mengubah paradigma negatif tentang panti werdha. Kedepannya kebutuhan akan rumah perawatan juga perlu menjadi perhatian, terutama diperuntukan untuk lansia dengan ekonomi menengah. Selama ini panti werdha milik pemerintah masih diprioritaskan untuk lansia terlantar, sedangkan rumah perawatan lansia kelompok ekonomi atas

Daftar Pustaka

- Aguila, E., Mejia, N., Perez-Arce, F., Ramirez, E., & Rivera Illingworth, A. (2016). Costs of extending the noncontributory pension program for elderly: The Mexican case. *Journal of aging & social policy*, 28(4), 325-343.
- Annisa, W., Muladefi, C., Niko, D., Linda, W., & Endah, P. (2019). Pelatihan tugas perawat kesehatan keluarga caregiver Lansia dalam program Rumah Ramah Lansia. *Indonesian Journal of Community Engagement*, 448-462.
- Arza, C. (2019). Basic Old-Age Protection in Latin America: Noncontributory Pensions, Coverage Expansion Strategies, and Aging Patterns across Countries. *Population and Development Review* 45, 23-45.
- Babbie, E. R. (2010). *The practice of social research*. London: Belmont, CA : Wadsworth.
- Bappenas. (2017, Mei 22-24). Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan . Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Bastaman, H. (2007). *Logoterapi: Psikologi untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup Bermakna*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- BPS. (2019). *Satistik Penduduk Lanjut Usia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- BPS. (2019). *Statistik Pemuda Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- BPS. (2020). *Indikator pasar tenaga kerja Indonesia Februari 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Brown, R. (2008). Designing a social security pension system. *International social security review*, 61(1), 61-79.
- Carstensen, L. (2003). *Growing Old or Longevity*. California: Stanford University.
- Cho, S., & Heshmati, & A. (2015). "What If You Had Been Less Fortunate: The Effects of Poor Family Background on Current Labor Market Outcomes." . *Journal of Economic Studies* 42, 1: 20-33.
- Committee, T. I. (2020). *National Pension System*. Retrieved from <https://www.tokyo-icc.jp/>: https://www.tokyo-icc.jp/guide_eng/life/01.html#:~:text=The%20Japanese%20pension%20system%20is,in%20the%20national%20pension%20plan
- Coren, S., Ward, L. M., & Enns, J. T. (2001). *Sensation and Perception*. Fort Worth: Harcourt College Publishers.
- Desiningrum, D. R. (2014). Kesejahteraan Psikologis Lansia Janda/Duda Ditinjau dari Persepsi Terhadap Dukungan Sosial dan Gender. *Jurnal Psikologi Undip*, 102-106.

- FIAP. (2018, July). Pension Note No. 27- " Experiences with coverage programs for financing the care of dependent senior citizens ". Santiago, Chile.
- Foster, L. (2017). Young people and attitudes towards pension planning. *Social Policy and Society*, 16(1), 65-80.
- Hardgrove, A. (2014). Youth Vulnerabilities in Life Course Transitions. *United Nation Development Programme (UNDP) Occasional Paper*. New York: United Nation Development Programme.
- ILO. (2014). *World Social Protection Report 2014/2015: Building Economic Recovery, Inclusive Development and Social Justice*. Geneva: ILO.
- ILO. (2018). *Edisi khusus Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga* . Retrieved from <https://www.ilo.org>: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_630694.pdf
- Kiefer, S., & Sailing, P. (2002). Retirement and Leisure Time. *Journal of Psyciatric*, 10-28.
- Lee, R., & Mason, A. (2011). Population aging and the generational economy. *A global perspective*, 526.
- Li, J., Wang, X., Yuan, C., & Xu, J. (2018). The Role of Public Pensions in Income Inequality among Elderly Households in China 1988–2013.
- Maryam, R., Rosidawati, R., Riasmini, N., & Suryati, E. (2012). Beban Keluarga Merawat Lansia Dapat Memicu Tindakan Kekerasan dan Penelantaran Terhadap Lansia. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 15(3), 143-150.
- Mays, N., Roberts, E., & Poppay, J. (2001). Synthesising research evidence. In *Studying the organisation and delivery of health services. Research methods*, 220.
- Melguizo, A. (2015). *Pensions, informality, and the emerging middle class*. IZA World of Labor.
- Mulyanto, J., Kringos, D. S., & Kunst, A. E. (2019). Socioeconomic inequalities in healthcare utilisation in Indonesia: a comprehensive survey-based overview. *BMJ Open* 9(7), DOI: 10.1136/bmjopen-2018-026164.
- OECD. (2017). *Preventing Ageing Unequally*. Retrieved from www.OECD.org: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/preventing-ageing-unequally_9789264279087-en
- OECD. (2019). *Publication Pension at a Glance 2019: OECD and G20 indicators*. Retrieved from www.oecd.org: <https://www.oecd.org/publications/oecd-pensions-at-a-glance-19991363.htm>
- Paiva, L. (2016). Poverty and Inequality Reduction in Brazil – A Parenthesis in History or the Road Ahead? *Iberoamericana – Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 45(1), 37-50. DOI: <http://doi.org/10.16993/iberoamericana.4>.

- Pradono, G., & Pernamasari, S. (2010). Hubungan antara penyesuaian diri dengan kecemasan dalam menghadapi pensiun pada pegawai negeri sipil di Provinsi DIY. *Jurnal Ilmiah*.
- Putra, D. (2019). Potret kekerasan terhadap Lansia perempuan di Indonesia. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 5(1), 12-21.
- Ryff, C., & Keyes, C. L. (1995). The structure of psychological well-being revisited. *Journal of Personality and Social Psychology*. 69, 719-727.
- Samudra, R., & Wisana, D. (2016). Female labor force participation of sandwich generation in Indonesia. *The 13th Indonesian Regional Sciences Association International Institute Conference*. Malang, Indonesia.
- Siregar, N. (2019). Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Binjai. *Repositori Institusi USU*.
- Solihin. (2016). *Pengalaman keluarga dalam merawat Lansia yang mengalami alzheimer di kota Bandung*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Ståhlberg, A. C. (2005). Pension design and gender: Analyses of developed and developing countries. *Gender Issues* 22(3), 7-45.
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the public sector: Fourth international student edition*. WW Norton & Company.
- Sugiharto, C. (2010). *Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Kepuasan Hidup pada Lansia di Panti Wreda "x" Bandung*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Suryahadi, Asep, Widyanti, W., Perwira, D., & Sumarto, S. (2010). Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector. In *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 39 (1) (pp. 29-50).
- Tan, P. (2018). Dual Burdens of Care: "Sandwiched Couples" in East Asia. *Journal of Aging and Health*, 30(10), 1574-1594.
- TNP2K. (2018). *Konferensi Internasional tentang Perlindungan Sosial bagi Lansia*. (TNP2K, Performer) Jakarta.
- UNFPA. (2017). *State of World Population Worlds Apart Reproductive health and rights in an age of inequality*. New York: Prographics, Inc.
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019). *World population ageing 2019: highlights*. (ST/ESA/SER.A/430): United Nations.
- Wahidah, N. (2016). Hubungan persepsi terhadap masa pensiun dengan perilaku menabung pada pekerja usia dewasa awal.
- WHO. (2017). *World Health Organization*. Retrieved from <https://www.who.int>: https://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/en/

Daftar Pustaka

WHO. (2019). *Dementia*. Retrieved from Fact Sheet WHO: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia>

Yulaswati, V. (2015, Mei 27). *Perlindungan Sosial Lanjut Usia*. Retrieved from <http://www.cas.ui.ac.id>: <http://www.cas.ui.ac.id/wp-content/uploads/seminar-27052015/Perlindungan-Sosial-LANSIA-CAS.pdf>

Kebijakan:

UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

PP No. 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun

PP No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua



PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

Perkumpulan PRAKARSA adalah lembaga think tank di Indonesia yang melakukan tugas untuk membangun dan meningkatkan kebijakan serta ide dalam membangun kesejahteraan melalui penelitian yang independen dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kami menggabungkan penelitian dengan analisis kebijakan, komunikasi, dan advokasi, serta melakukan transfer ilmu pengetahuan untuk menjadi aksi yang dapat mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

www.theprakarsa.org

Jl. Rawa Bambu I Blok A No. 8E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

 +62 21 7811 798

 perkumpulan@theprakarsa.org

  Perkumpulan PRAKARSA

  ThePRAKARSA

ISBN 978-623-95082-4-1

